

Dr. Sri Umiyati, M.Si.
Dr. Sri Wahyuni, M.Si.

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TERPADU

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TERPADU

Pendekatan Kearifan Lokal

Pengelolaan Pariwisata melalui Collaborative Governance yang berbasis kearifan lokal. Persoalan dalam pengelolaan pariwisata yang berada pada wilayah empat kabupaten dengan kondisi geografis yang memang sangat luas dan terdiri dari gunung dan bukit, sehingga akses menuju daerah-daerah yang terpencil tersebut cukup sulit. Hal ini kemudian dapat menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam pengelolaan pariwisata guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai keterbatasan yang ada. Pengelolaan dalam pariwisata dalam perspektif kearifan lokal dimana batas wilayah optimal yang bisa dijangkau dalam pelayanan publik, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi, kontrol masyarakat dan birokrasi menjadi sangat penting. Dimana penentuan batas yang akurat berorientasi pada administrasi berkualitas untuk menghadapi perubahan dan kompleksnya pelayanan pariwisata, segala fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, harapannya pelayanan pariwisata kepada masyarakat dapat berjalan optimal.



PT Mafy Media Literasi Indonesia
ANGGOTA IKAPI (041/SBA/2023)
Email: penerbitmafya@gmail.com
Website: penerbitmafya.com



**MODEL
COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA TERPADU**
Pendekatan Kearifan Lokal

UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan pembahasan ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**MODEL
COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENGELOLAAN
KAWASAN WISATA TERPADU**
Pendekatan Kearifan Lokal

Dr. Sri Umiyati, M.Si.

Dr. Sri Wahyuni, M.Si.



**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TERPADU: Pendekatan
Kearifan Lokal**

Penulis:

Dr. Sri Umiyati, M.Si.

Dr. Sri Wahyuni, M.Si.

Desainer:

Tim Mafy

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

viii, 90 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8390-66-3

Cetakan Pertama:

September 2023

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
Penerbit.**

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
BAB I PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU	1
BAB II COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA	7
BAB III FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN COLLABORATIVE GOVERNANCE.....	11
A. Model Hubungan Antar Pemerintah Daerah.....	12
B. Pengelolaan Pariwisata yang Berbasis Kearifan Lokal	19
BAB IV KONDISI MASYARAKAT KAWASAN WISATA TERPADU.....	21
BAB V MENGENAL TAMAN NASIONAL BROMO TEMGGER SEMERU	59
BAB VI PENGELOLAAN DESTINASI WISATA TERPADU ..	67
BAB VII MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA.....	77
DAFTAR PUSTAKA	83
PROFIL PENULIS.....	87

PRAKATA

Segenap rasa syukur yang tak pernah henti penulis persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kemudahan dan petunjuk dari-Nya yang tak henti-hentinya penulis terima, hingga saat ini penulis telah menyelesaikan sebuah buku referensi ini dengan judul **MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA TERPADU: Pendekatan Kearifan Lokal.**

Pengelolaan Pariwisata melalui Collaborative Governance yang berbasis kearifan lokal. Persoalan dalam pengelolaan pariwisata yang berada pada wilayah dengan kondisi geografis yang memang sangat luas dan terdiri dari gunung dan bukit, sehingga akses menuju daerah-daerah yang terpencil tersebut cukup sulit. Hal ini kemudian dapat menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam pengelolaan pariwisata guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai keterbatasan yang ada. Pengelolaan dalam pariwisata dalam perspektif kearifan lokal dimana batas wilayah optimal yang bisa dijangkau dalam pelayanan publik, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi, kontrol masyarakat dan birokrasi menjadi sangat penting. Dimana penentuan batas yang akurat berorientasi pada administrasi berkualitas untuk menghadapi perubahan dan kompleksnya pelayanan pariwisata, segala fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, harapannya pelayanan pariwisata kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses penyelesaian buku ini. Kepada keluarga, rekan dan seluruh tim Penerbit PT Mafy Media Literasi Indonesia yang telah melakukan proses penerbitan, cetak, dan distributor terhadap buku kami, penulis haturkan terima kasih.

Penulis menanti saran konstruktif untuk perbaikan dan peningkatan pada masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dan khazanah informasi. Sebagaimana peribahasa tak ada gading nan tak retak, mohon dimaafkan segala kekeliruan yang ada pada terbitan ini. Segala kritik dan saran, tentu akan diterima dengan tangan terbuka.

Penulis

BAB I

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TERPADU

SELARAS dengan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur juga memfokuskan tiga proyek pengembangan kawasan selatan Jatim, yaitu percepatan pembangunan Industri Jawa Timur 1 di GKS atau wilayah Gerbang Kertasusila, JLS (Jalur Lingkar Selatan), dan proyek pembangunan kawasan BTS (Bromo Tengger Semeru). Dalam membangun Kawasan BTS yang merupakan program strategis nasional diperlukan kerja sama yang sinergis dengan melibatkan ke empat daerah penyangga yaitu Lumajang, Probolinggo, Pasuruan dan Malang dan kerja sama antar daerah lintas batas merupakan kewenangan Provinsi. Secara teoritis bahwa kerja sama antar daerah menguntungkan kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan diantara berbagai pihak. Namun tidaklah mudah untuk mengadakan sinergistas kerja sama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu untuk membangun ekonomi pariwisata berbasis knowledge diperlukan sinergistas kerja sama diantara tiga aktor yaitu *government* (pemerintah), *private* dan akademik. Sehingga nantinya diharapkan dalam mengelola kompleksitas problematik Kawasan BTS diperlukan pelibatan pemangku kepentingan akademik, *business*

(*private*), *community*, *government* dan media. (Alfitra Perdana :2021)

Kawasan BTS yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang berada dibawah naungan KLHK dimana kawasan tersebut berada di wilayah provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya berada di lingkaran empat daerah kabupaten, yakni kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang. Realitas tersebut menunjukkan adanya potensi dan peluang kerja sama diantara pihak-pihak yang terkait baik pihak pemerintah pusat (melalui Balai Besar TNBTS), pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, maupun keempat Pemerintah Daerah Kabupaten di kawasan BTS guna menunjang terlaksananya peraturan presiden di atas. (Darwati, D : 2019) Yang tidak kalah penting bahwa perlunya kerja sama antar daerah untuk menghindari konflik kepentingan, mungkin saja akan terjadi. Sebagai contoh kasus konflik antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang memperebutkan gunung Kelud, yang masing-masing pihak mengklaim sebagai wilayahnya. Demikian juga dapat dimungkinkan akan terjadi di kawasan BTS atau sekitarnya seperti air terjun tumpak sewu dimana tempat wisata air terjun tumpak sewu tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Malang, akan tetapi akses jalan masuknya melalui wilayah Kabupaten Lumajang. (Dwiyanto, Agus. 2011)

Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan serta kerja sama dengan pihak lain baik itu swasta maupun masyarakat. Collaborative Governance merupakan solusi bagi pemerintah dalam mengatasi

permasalahan yang ada demi peningkatan akses ekonomi masyarakat.

Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerja sama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. (Agustina, D. 2018) Penjelasan tersebut menegaskan bahwa berbagai bentuk kerja sama, interaksi di pemerintahan, maupun resolusi konflik di berbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung akan menerima dampak dari penyelenggaraan pemerintahan. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan dapat dioptimalkan melalui perencanaan. Salah satu negara yang menggunakan pendekatan kolaboratif yaitu Indonesia. Permasalahan utama negara berkembang seperti Indonesia, terutama di daerah perkotaan yaitu kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, kebutuhan akan air bersih, maupun kebutuhan akan udara yang sehat. Hafis, Hakim, dan Haryono (2012) menambahkan bahwa selain permasalahan tersebut, masyarakat global saat ini juga menghadapi masalah yang salah satunya berkaitan dengan Pariwisata dan Transportasi. Oleh karena itu pembahasan ini menjadi penting untuk dilakukan, dimana pembahasan ini ingin menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Tata Kelola Pariwisata yang berbasis Kearifan Lokal serta menghasilkan Model Collaborative Governance dalam pengelolaan kawasan wisata terpadu melalui pendekatan Kearifan Lokal. (Eprilianto, D. F: 2020)

Tujuan khusus untuk meningkatkan Pengelolaan Pariwisata melalui Collaborative Governance yang berbasis kearifan lokal. Persoalan dalam pengelolaan pariwisata

yang berada pada wilayah dengan kondisi geografis yang memang sangat luas dan terdiri dari gunung dan bukit, sehingga akses menuju daerah-daerah yang terpencil tersebut cukup sulit. Hal ini kemudian dapat menyebabkan kesulitan bagi pemerintah dalam pengelolaan pariwisata guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai keterbatasan yang ada. Pengelolaan dalam pariwisata dalam perspektif kearifan lokal dimana batas wilayah optimal yang bisa dijangkau dalam pelayanan publik, pembangunan, penarikan sumberdaya, partisipasi, kontrol masyarakat dan birokrasi menjadi sangat penting. Dimana penentuan batas yang akurat berorientasi pada administrasi berkualitas untuk menghadapi perubahan dan kompleksnya pelayanan pariwisata, segala fasilitas, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, harapannya pelayanan pariwisata kepada masyarakat dapat berjalan optimal. Dimana dalam pengelolaan pariwisata tidak ada konflik yang terjadi antara masing-masing daerah melalui pendekatan kearifan lokal masyarakatnya. (Junaidi, 2016)

Penulis memberikan kontribusi pengembangan IPTEKS berupa model dan desiminasi collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata yang berorientasi pada kearifan lokal masyarakat. Sistem Pelayanan Pariwisata yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar daerah wisata. Usulan model diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan pariwisata, kualitas sumber manusia, serta memperbaiki faktor sumber daya alam dan sistem.

Collaborative Governance dalam pengelolaan pariwisata, memberikan kontribusi bagi regulasi implementasi dari pelayanan pariwisata yang terintegrasi

pada daerah dan berorientasi pada kearifan lokal masyarakat yang ada di wilayah. Selain pertimbangan ekonomis, *collaborative governance* harus mempertimbangkan bahwa integrasi yang dilaksanakan, selain mampu menjangkau masyarakat di kawasan destinasi wisata, juga akan membangkitkan harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, sehingga mengurangi konflik yang terjadi dan diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanan pariwisata, kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki faktor sumber daya yang terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam bingkai kearifan lokal. (Nababan, 2013)

BAB II

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA

Ansell *and* Gash menjelaskan strategi baru dari pemerintahan disebut sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Bentuk dari governance yang melibatkan berbagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. (Ansell dan Gash. 2007). O'Flynn dan Wanna mengartikan kolaborasi sebagai bekerja bersama atau bekerja sama dengan orang lain. Hal tersebut menyiratkan bahwa seorang aktor atau seorang individu, kelompok atau organisasi melakukan kerjasama dalam beberapa usaha. Setiap orang yang melakukan kerjasama dengan yang lainnya memiliki ketentuan syarat dan kondisi tertentu, dimana hal tersebut sangat bervariasi. Kata *collaboration* pada awalnya digunakan pada abad kesembilan belas dalam perkembangan industrialisasi, munculnya organisasi yang lebih kompleks, dan pembagian kerja dan tugas yang meningkat. Kondisi tersebut merupakan norma dasar utilitarianisme, liberalisme sosial, kolektivisme, saling membantu dan kemudin manajemen ilmiah dan teori organisasi hubungan manusia. (Ansell, C. dan Alison G. 2007)

Wisata yang berkelanjutan diwujudkan melalui perencanaan pengembangan wisata yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi kawasan tersebut, dengan adanya pengumpulan informasi secara menyeluruh tentang potensi sumber daya yang ada dan dukungan kawasan terhadap pengembangan ekowisata yang di dukung dengan fisik, fasilitas penunjang yang tersedia termasuk keterbukaan masyarakat dalam menyikapi kedatangan pengunjung. Seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat, dalam kolaborasi yang dikembangkan baik dari pemerintah, NGO (*Non Governmnet Organization*), maupun swasta. Pengembangan potensi Wisata Bromo Tengger Semeru di empat Kabupaten, yaitu Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang dapat terlihat dari destinasi mencegah atau mengantisipasi terhadap kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat dengan melibatkan masyarakat local sehingga merasakan kesejahteraan dari program pengembangan pariwisata yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial budaya dan konservasi. Implementasi dari ketiga aspek tersebut akan membentuk keberlanjutan destinasi wisata Bromo Tengger Semeru yang berorientasi pada kearifan lokal masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah dengan pihak wisata diharapkan aset publik ini dapat dikembangkan lebih cepat, terdapat manajemen pemanfaatan dan pemeliharaan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih nyaman dalam memanfaatkan. (Nadia F. Tongkotow, 2021)

Fasilitas yang ada di Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS) antara lain Penginapan, mushola, toilet, tempat parkir dan warung makanan-minuman ringan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahn 2009

tentang Kepariwisata, bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Memberdayakan lingkungan secara berkelanjutan dengan mewujudkan ketiga pilar *governance* tersebut yaitu:



Gambar 2.1. Tiga Pilar *Governance*

1. Peran Pemerintah Dalam pandangan pemerintah yang disebutkan bahwa pembangunan kawasan wisata yang ditunjukkan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Peran Swasta

Dalam hal ini peran swasta pariwisata sebagai wadah pencarian warga sekitar dalam meningkatkan kerajinan, UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan mengembangkan hasil industri masyarakat yang memanfaatkan lingkungan pariwisata dalam menyediakan fasilitas pariwisata mempermudah akses transportasi.

3. Peran Masyarakat

Dalam hal ini peran masyarakat hendak dapat menjadi wadah dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung atau wisatawan, masyarakat setempat dapat berkerjasama dalam wisata budaya dapat dilakukan mulai dari manajemen sampai pada pemasaran, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran agar melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. (Imam Surya : 2021)

BAB III

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEBERHASILAN COLLABORATIVE GOVERNANCE

Goldsmith dan Kettl menyebutkan bahwa terdapat hal penting yang bisa dijadikan kriteria keberhasilan sebuah network atau kolaborasi dalam governance, yaitu: *Networked Structure, Commitment to a Common Purpose, Trust Among The Participants, Governance, Access to Authority, Distributive Accountability/Responsibility, Information Sharing, Access to Resources.* (Harding, A. (2017).

Robertson dan Choi (2010) mendefinisikan Collaborative Governance sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut. Dwiyanto menjelaskan secara terperinci bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyampaian visi, tujuan, strategi, dan aktivitas antara pihak, mereka masing-masing tetapi memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun merka tunduk pada kesepakatan

bersama. (Dwiyanto, Agus. 2011)

A. MODEL HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH

Model hubungan antar pemerintah menurut Wright (1982:29-40) terdiri dari 3 (tiga) tipe, yaitu:

1. Coordinate Authority Model

Model ini dicirikan dengan batas wilayah yang tegas antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara bagian. Pemerintah lokal sangat tergantung pada pemerintah negara bagian yang otonom. Dalam model ini, aturan yang diacu di Amerika Serikat adalah Dillon's Law yang menganggap bahwa pemerintah lokal diciptakan oleh pemerintah Negara bagian. Dalam Dillon's law dijelaskan rangkuman tentang hubungan kekuasaan antara negara bagian dan lokalitas (1) tidak ada kesamaan hak dalam hukum pemerintah lokal, (2) entitas lokal adalah pihak yang tunduk pada negara bagian, dimana penciptaan dan penghapusan kekuasaan ditentukan oleh negara bagian (pembatasan konstitusional), (3) Pemerintah lokal hanya dapat melaksanakan kekuasaan mereka yang telah ditetapkan secara tegas, (4) Pemerintah lokal sekadar sebagai pelaksana kehendak legislatif.

2. Inclusive Authority Model

Model ini dicirikan dengan kekuatan yang proporsional antara tingkat pemerintahan dan diantara tingkat pemerintahan tersebut terjadi saling menghormati. Hubungan ketergantungan sama dengan aturan Dillon. Untuk hubungan pemerintah Negara bagian dengan pemerintah lokal, yaitu mereka hanya sebagai "pelayan" pemerintah nasional. Dengan model

ini, pemerintah nasional sebagai pengarah.

Dalam model ini, bahwa semakin besar atau luas kekuasaan yang dimiliki pada level nasional, maka akan semakin kecil atau sempit kekuasaan yang didapat/dimiliki oleh pemerintahan level negara bagian dan lokal. Demikian sebaliknya, apabila kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepada Negara bagian dan lokal, maka akan semakin kecil atau sedikit kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh nasional. Tetapi yang perlu disadari adalah bahwa sebesar/seluas apapun kewenangan yang dimiliki oleh negara bagian dan lokal, tidak akan melebihi kewenangan nasional.

3. *Overlapping Authority Model/The Spider Web Model*

Pada model ini, terdapat proses "tawar menawar" antara pemerintah nasional dengan pemerintah Negara bagian dan pemerintah lokal. Pemerintah nasional menawarkan suatu program kepada pemerintah Negara bagian dan pemerintah lokal, dan pemerintah Negara bagian atau pemerintah lokal dapat menerimanya dengan memenuhi persyaratan yang diterapkan pemerintah nasional.

Heidi dan Curt (2012:1) mendefinisikan model ini sebagai "*The Spider Web Model of Intergovernmental Relations*", lebih lanjut Koenig dan Curt (2012:1) menyatakan "*The spider web model of intergovernmental relations represents a big picture approach that consists of vertical and horizontal policy networks of dynamic and fluid interconnections between interdependent actors and organizations acting within political, fiscal, legal, regulatory, and bureaucratic opportunities and constraints.*" Dimana model ini menggambarkan adanya jejaring kebijakan

baik di tingkat vertikal maupun horizontal yang saling terjalin interkoneksi secara dinamis dan cair diantara aktor-aktor dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam aspek politik, fiskal, legal, regulasi, dan peluang-kendala birokratis.

Model overlapping sebagai model yang paling representatif dari praktek model IGR. Setiap level pemerintahan mempunyai kewenangan yang sama dalam berbagai sektor. Untuk itu diperlukan tawar-menawar atau "negosiasi" dalam menggunakan kewenangan itu pada masing-masing level. Singkatnya, karakteristik dari model otoritas yang tumpang tindih adalah (1) terbatasnya kekuasaan yang tersebar, (2) saling ketergantungan, (3) memiliki batas wilayah otonomi, (4) tawar-menawar hubungan perubahan, (5) kerja sama dan kompetisi.

Model overlapping dapat dipahami dalam konteks hubungan antarpemerintahan di Indonesia. Proses desentralisasi yang dilakukan telah membawa implikasi signifikan pada hubungan antara pejabat di pemerintah pusat dengan pejabat di daerah maupun dengan entitas politik secara umum di daerah. Gebrakan yang dilakukan oleh kebijakan desentralisasi pada tahun 1999 telah meruntuhkan hubungan hierarki antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota (Mubarak, dkk., 2006; Haris, 2005). Label "Daerah Tingkat", yaitu provinsi sebagai Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Tingkat II juga dihapuskan untuk mempertegas model relasi yang lebih horizontal antara provinsi dengan kabupaten. Otonomi dan kekhasan antar desa juga dipertegas sehingga pola relasi yang lebih horisontal juga lebih dominan daripada

sebelumnya (Kumorotomo, 2010).

Bentuk-bentuk hubungan antar daerah sebagaimana digambarkan diatas tidak terjadi begitu saja. Secara kronologis hubungan antardaerah akan terbangun secara matang setelah terlebih dahulu melewati proses pembentukan hubungan yang tidak sederhana. Dapat dikatakan bahwa secara kronologis hubungan antar pemerintah (IGR) sudah berubah-ubah dan telah menjadi bagian yang terus menerus dibahas dan diamati dalam administrasi publik sejak lima puluhan tahun yang lalu (Cooper et al. 1998: 101), Intergovernmental Relations (IGR) have been an intricate part of public administration for more than fifty years, dan bentuknya berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari perubahan sistem politik.

Taylor (2003) memberikan deskripsi yang cukup lengkap mengenai bentuk-bentuk kerja sama antar pemerintah daerah dalam pelayanan publik dapat beragam, yaitu diantaranya:

1. *Handshake Agreement*. Model ini juga disinggung oleh Rosen (1993) yaitu bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan yang dicirikan oleh tidak adanya dokumen perjanjian kerja sama yang formal. Kerja sama model ini didasarkan pada komitmen dan kepercayaan secara politis antardaerah yang terkait. Biasanya, bentuk kerja sama seperti ini dapat berjalan pada daerah-daerah yang secara historis memang sudah sering bekerja sama dalam berbagai bidang. Bentuk kerja sama ini cukup efisien dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pemerintah daerah. Meski begitu, kelemahan model ini adalah potensi munculnya

kesalahpahaman, terutama pada masalah-masalah teknis. dan *sustainability* kerja sama yang rendah, terutama apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, bentuk kerja sama ini sangat jarang ditemukan pada isu-isu strategis.

2. *Fee for service contracts (service agreements)*. Sistem ini, pada dasarnya adalah satu daerah "menjual" satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. Misalnya air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama. Keunggulan sistem ini adalah bisa diwujudkan dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, daerah yang menjadi "pembeli" tidak perlu mengeluarkan biaya awal (*start-up cost*) dalam penyediaan pelayanan. Akan tetapi, biasanya cukup sulit untuk menentukan harga yang disepakati kedua daerah.
3. *Joint Agreements* (pengusahaan bersama). Model ini, pada dasarnya mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dari daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah-pemerintah daerah berbagi kepemilikan kontrol, dan tanggung jawab terhadap program. Sistem ini biasanya tidak memerlukan perubahan struktur pemerintahan daerah (menggunakan struktur yang sudah ada). Kelemahannya, dokumen perjanjian (*agreement*) yang dihasilkan biasanya sangat rumit dan kompleks karena harus mengakomodasi sistem birokrasi dari pemda-pemda yang bersangkutan.
4. *Jointly-formed authorities* (Pembentukan otoritas bersama). Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali,

pengelolaan dan tanggung jawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan dari pemda-pemda yang terkait. Badan ini bisa juga diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang diurusnya, termasuk biasanya otonom secara politis. Kelemahannya, pemda-pemda memiliki kontrol yang lemah terhadap bidang yang diurus oleh badan tersebut.

5. *Regional Bodies*. Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia, peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi. Adapun dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah, model kerja sama yang disarankan adalah sebuah badan kerja sama yang independen atau terpisah dari kelembagaan pemerintah daerah, dan dikelola secara profesional dengan prinsip manajemen bisnis murni. Hal ini karena badan semacam ini dapat bergerak lebih fleksibel dan terpisah dari birokrasi yang kadang menghambat inovasi-inovasi strategi perdagangan.

Thompson (1967) mengungkapkan tentang kerja sama antar daerah melalui pendekatan kedalaman

koordinasi yang terjadi antar organisasi pemerintah daerah. hal ini mengingat dengan koordinasi diharapkan harmonisasi atau keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga pada setiap organisasi menjadi seimbang dan selaras. Kebutuhan koordinasi tergantung sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat ketergantungan dari tiap satuan pelaksanaan.

Pada perspektif Thompson ini, tinjauan kerja sama antardaerah lebih menekankan pada prinsip-prinsip kewenangan dan implikasi hubungan hierarkhial antar organisasi pemerintah daerah. menurut Thompson prinsip rentang manajemen berkaitan erat dengan seberapa besar organisasi yang ada pada level yang lebih rendah yang dapat dikendalikan secara efektif oleh organisasi yang berada pada level di atasnya. Antara rentang manajemen dan koordinasi saling berhubungan erat. Ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan semakin sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi-organisasi level bawah secara efektif.

Terdapat tiga macam saling ketergantungan diantara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh Thompson (1967):

1. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooledinterdependence*), terjadi apabila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequentialinterdependence*), terjadi dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya

terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.

3. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocalinterdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar datuan organisasi

Terkait dengan pemerintah provinsi sebagai koordinator maka terdapat hubungan antara tipe ketergantungan tugas dengan mekanisme koordinasi yaitu tugas terpusat hanya menggunakan peraturan dan prosedur, ketergantungan tugas berurutan menggunakan peraturan, prosedur dan penjadwalan, sedangkan ketergantungan timbal balik menggunakan semua bentuk koordinasi tersebut ditambah dengan saling penyesuaian.

B. PENGELOLAAN PARIWISATA YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pengembangan kawasan wisata ini dimaksudkan untuk menambah keindahan dari tempat wisata tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada. Pengelolaan dan pemasaran yang baik adalah salah satu cara untuk mengembangkan kawasan wisata supaya dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Sebagian kota-kota besar di Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan sektor pariwisata alam sebagai daya tarik dan aset bagi pemasukan daerah termasuk BTS Bromo Tengger Semeru. Pertumbuhan ekonomi, mempertimbangkan hal tersebut maka penanganan yang baik sangat diperlukan dalam upaya pengembangan obyek-obyek wisata di Indonesia.. Langkah tersebut dilakukan guna mengetahui potensi dan permasalahan yang ada pada setiap obyek untuk kemudian mencari solusinya. Sudah banyak studi yang menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia secara

tradisional berhasil menjaga dan memperkaya keanekaan hayati alami. Adalah suatu realitas bahwa sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lain sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat.

Mereka umumnya memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumberdaya lokal yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. (Bono. B. P. dan Pulungun. M. S., 2010) Sampai saat ini hanya sebagian yang sangat kecil saja yang dikenal dunia ilmu pengetahuan modern tentang sistem-sistem lokal. Meskipun Collaborative governance atau kerja sama merupakan sifat interaksi antara masyarakat, namun pengelolaan dan pemanfaatan cenderung makin berkurang, interaksi antara masyarakat lebih banyak terekspresi dalam bentuk saling kompetisi. (Purwanti, Nurul D, 2016). Kearifan lokal atau tradisional merupakan bagian dari etika dan morolitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam (Keraf, S. A., 2012).

Bahasan ini sangat membantu kita dalam hal mengembangkan perilaku, baik secara individu maupun secara kelompok dalam kaitan dengan lingkungan dan upaya pengelolaan sumberdaya alam. Etika yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, dalam arti kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau pada kelompok masyarakat (Nababan, 2013).

BAB IV

KONDISI MASYARAKAT

KAWASAN WISATA TERPADU

Kawasan TNBTS merupakan rumah bagi Suku Tengger, yang merupakan Sub- suku Jawa. Suku ini dipercaya sebagai keturunan asli kerajaan Majapahit. Walaupun sebagian Suku Tengger merupakan pemeluk agama Hindu, Budha, ataupun Islam, tetapi dalam kesehariannya mereka secara bersama-sama menggunakan budaya dan adat Tengger. Di samping terdapat struktur organisasi pemerintah formal, masyarakat Tengger juga mengenal struktur organisasi non-formal terutama dalam hal peradatan. Struktur organisasi non-formal ini dipimpin oleh "tokoh agama", yang bertugas memimpin upacara-upacara adat dan ritual keagamaan.

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani sayuran, dengan komoditas utama kentang, kubis, bawang daun dan wortel. Suku Tengger ini mendiami 2 (dua) desa enclave (Ngadas dan Ranupani) dan beberapa desa penyangga kawasan TNBTS. Pengaturan penggunaan lahan diatur secara tradisional dengan menggunakan budaya tengger. Secara garis besar penggunaan lahan dibedakan menjadi: lahan untuk pemukiman; lahan untuk pertanian; dan lahan untuk hutan. Dengan kearifan lokal tersebut, bahkan waktu tanam untuk pertanian diatur dengan aturan "pranoto

mongso”, yaitu pengaturan bulan tanam terutama untuk komoditas tertentu.

1. Kabupaten Pasuruan

Kawasan wisata Bromo Tengger Semeru (BTS) merupakan salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau 10 Bali baru. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisata dan investasi di Indonesia. Kawasan BTS merupakan salah satu gunung berapi aktif yang dikelilingi oleh lautan pasir, danau dan kawasan alam lainnya. Kawasan ini secara teritorial masuk kedalam wilayah Kabupten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang. Kawasan BTS memiliki peran strategis tidak hanya untuk pariwisata saja namun juga aspek sosial, ekonomi, budaya dan adat istiadat. Dari sisi pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tercatat sebanyak 690.831 pada tahun 2019. Namun demikian, tingginya minat wisatawan, pemerintah perlu juga memperhatikan pengembangan pariwisata di sekitar BTS, daya dukung lingkungan, aspek kebencanaan, tata kelola, dan masyarakat hukum adat. Pembangunan di sektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan khususnya di kawasan BTS. Hal ini, dimaksudkan untuk menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan

kerja terutama bagi masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan Perpres no 3 tahun 2016, dan Peraturan Presiden no 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Lamongan, Kawasan BTS, serta Kawasan slingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 mengamanatkan adanya proses pembangunan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kawasan. Dengan demikian arah pembangunan kepariwisataan yang dimaksud akan berada dalam lingkup: 1) industri pariwisata, 2) destinasi pariwisata, 3) pemasaran dan 4) kelembagaan kepariwisataan dengan mengutamakan karakter lokal yang telah dimiliki. Kabupaten Pasuruan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 menekankan adanya kawasan pembangunan pariwisata yang telah memiliki daya tarik. Seperti diamanatkan dalam peraturan daerah tersebut, terdapat kelompok daya tarik wisata yang menjadi kekuatan Kabupaten Pasuruan yakni: a) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah barat yaitu Kecamatan Sukorejo, Pandaan, Prigen dan Gempol sebagai kawasan pusat wisata alam, budaya, buatan, religi, edukasi, belanja dan kuliner; b) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah tengah, yaitu Kecamatan Rembang, Wonorejo, Kejayan, Pohjentrek, Gondangwetan, sebagai kawasan industri, agro dan minat khusus; c) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah timur, yaitu Kecamatan Grati, Lumbang, Winongan, Gondang wetan sebagai kawasan wisata alam, industri

mebel dan religi; d) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah utara yaitu Kecamatan Beji, Bangil, Kraton, Rejoso, Lekok dan Nguling sebagai kawasan wisata budaya, belanja, kuliner, bahari dan religi; e) Kawasan Kabupaten Pasuruan wilayah selatan, yaitu Kecamatan Purwosari, Purwodadi, Tukur, Tosari, Puspo dan Pasrepan sebagai kawasan wisata alam, budaya, agro, kuliner, belanja dan edukasi. Dengan demikian, melalui arah pembangunan yang telah ditetapkan, pembangunan kawasan dapat terwujud dengan memosisikan BTS sebagai daya tarik utama. Adapun ke-lima kawasan yang telah ditetapkan merupakan pionir dalam merespon daya tarik BTS dengan memanfaatkan daya tarik lokal yang tersedia. Setidaknya ada tiga peranan pariwisata di kawasan BTS yaitu peranan ekonomi, peranan sosial dan kebudayaan. Peranan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja yaitu membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya. Salah satu permasalahan utama masih

terbatasnya pengembangan BTS adalah terbatasnya koordinasi dan pengelolaan terpadu Kawasan BTS secara professional. Hal ini, salah satunya dikarenakan keterlibatan berbagai pihak baik dari pemerintah pusat melalui Kementerian kehutan, dan juga beberapa daerah sekitar BTS dalam pengelolaan Kawasan BTS yang belum bersinergi. Selain meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat berkepentingan dalam upaya pengembangan Kawasan di sekitar BTS. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian secara mendalam mengenai potensi dan pengembangan pariwisata khusus wilayah BTS. Dimana salah satu tujuannya adalah peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan juga perekonomian Kabupaten Pasuruan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2016-2025. Oleh karena itu, kajian mengenai Pengembangan pariwisata khusus wilayah Bromo Tengger Semeru sangat penting dan perlu untuk dilakukan.

Potensi Ekonomi Pariwisata Pendukung BTS

Potensi ekonomi kecamatan tutur ditandai oleh keberadaan komoditas unggulan pertanian pada setiap destinasi wisatanya. Fakta tersebut semakin memperkuat bahwa potensi kecamatan tutur merupakan kecamatan dengan konsep dan brand pusat agrowisata yang tepat. Beberapa komoditas unggulan yang sudah siap dalam bentuk kemasan kegiatan pariwisata diantaranya adalah durian, kopi, bunga Krisan, sayur-sayuran, aneka buah – buahan, serta

komoditas peternakan berupa aneka produk olahan susu. Kemudian terdapat potensi desa wisata Kalipucang yang menjanjikan sebagai destinasi agrowisata. Pada desa tersebut, telah terdapat beberapa atraksi wisata yang disediakan untuk wisatawan seperti di mana keseluruhan berbasis alam dan hasil produksi pertanian desa. Ditunjang oleh keberadaan homestay dan pusat oleh-oleh membuat Desa ini semakin menjadi destinasi wisata potensial untuk lebih dikembangkan lagi di mana yang akan datang.

Kecamatan Tosari merupakan salah satu wilayah yang sangat dekat dengan BTS. Potensi ekonomi yang dimiliki adalah berbagai macam produk hasil pertanian khususnya sayur – sayuran. Tidak hanya itu, kecamatan tosari memiliki potensi ekonomi kreatif dalam bentuk usaha – usaha kerajinan, pahat dan seni ukir. Sejauh ini, meskipun belum di produksi dalam skala yang besar, potensi ekonomi kreatif ini sudah disandingkan Bersama aktivitas kepariwisataan sehingga menjadi daya tarik yang memiliki nilai tambah bagi destinasi wisata. Potensi lainnya adalah keberadaan homestay dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) lokal yang dapat dikembangkan agar menjadipusat oleh – oleh bagi wisatawan. Di masa yang akan datang potensi ini bisa diperkuat dengan kerja sama antar UMKM dan komunitas seperti Pasuruan Creative Network (PANCENE) ataupun UMKM SMART yang sudah sedemikian maju sehingga mampu menghimpun produk secara terkoordinir melalui anggota komunitas yang dimaksud.

Kecamatan Puspo memiliki potensi yang cukup banyak namun belum kembangkan secara optimal. Sebagaimana kecamatan Tuter dan Puspo, Kecamatan Puspo memiliki kelimpahan produk pertanian khususnya sayur dan buah – buahan. Meskipun belum menjadikan kegiatan pertanian sebagai bagian dari pariwisata, secara ekonomi, Kecamatan Puspo dapat menjadi wilayah penopang yang berkontribusi menjadi pemasok komoditas oleh – oleh hasil pertanian serta olahannya. Adapun potensi lainnya adalah di beberapa titik destinasi wisata, terdapat kelompok pengusaha kecil menjual berbagai macam produk. Saat ini UMKM tersebut melakukan aktivitas usaha secara terpisah, namun demikian di masa yang akan datang, UMKM tersebut dapat menjadi penunjang bagi wilayah pariwisata Puspo maupun kecamatan lain disekitarnya.

Kecamatan Purwodadi menyimpan potensi ekonomi berupa pertanian serta olahannya khususnya yang berasal dari Desa Tambaksari. Secara spesifik, Desa tersebut menjadi pusat budidaya tanaman apel sehingga tidak hanya dapat dikembangkan sebagai agrowisata tetapi juga wisata edukasi. Adapun kebun Raya Purwodadi saat ini masih fokus pada fungsi konservasi tanaman sehingga belum menonjolkan hasil pertanian sebagai produk komersial.

Kecamatan Purwosari menyimpan potensi ekonomi berupa produk hasil pertanian, perkebunan dan peternakan. Keberadaan UPTD Budidaya Ternak, Desa Kertosari, Eduwisata Kembang Kuning dan Wisata Edukasi dan Resort Kebun Pak Budi memegang peranan penting bagi kekuatan pariwisata kecamatan Purwosari di bidang ekonomi. Hal tersebut ditambah

dengan keberadaan Saygon Park dan Rafting Kali Jempingan yang memberikan fasilitas wahana hiburan buatan dan akomodasi bagi wisatawan.

Kecamatan Sukorejo memiliki potensi ekonomi yang sangat khas yakni komoditas Matoa dan Kurma yang akan dibalut dalam tema agrowisata. Meskipun terbilang baru sebagai pelaku wisata, Kecamatan Sukorejo khususnya melalui Desa Wonokerto mempersiapkan diri untuk menjadi the city of matoa. Selain itu, produk kurma beserta komoditas olahannya juga sudah disiapkan sehingga satu – satunya pilihan untuk agrowisata Kurma adalah di wilayah Kecamatan Sukorejo

Potensi Lingkungan Pariwisata Pendukung BTS

Kecamatan Tutur yang berpotensi sebagai pusat agrowisata Kabupaten Pasuruan memiliki keunggulan lingkungan di mana seluruhnya memiliki keindahan alam yang menarik sebagai destinasi wisata. Terdapat wisata kampung susu yang sudah limbang sebagai energi yang ramah lingkungan. Beberapa destinasi wisata khususnya di area pegunungan dan bukit dikelilingi oleh hutan sehingga dapat dikembangkan wahana–wahana pariwisata buatan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Sebagai contoh, desa Kalipucang dengan kondisi lingkungan yang mendukung sedang mengupayakan adanya tambahan atraksi wisata buatan seperti flying fox dan paralayang. Namun demikian, tantangan dari potensi lingkungan tersebut adalah terkait dengan pengelolaan sampah di mana semakin banyaknya kunjungan wisatawan berpotensi menambah sampah sehingga perlu dikelola

secara optimal sehingga tidak merusak lingkungan desa.

Kecamatan Tosari merupakan wilayah dengan potensi lingkungan yang sangat menjanjikan bagi wisata berbasis alam dan lingkungan. Potensi yang dimaksud telah dimanfaatkan oleh pengelola wisata untuk mendesain wisata berbasis alam dan lingkungan yakni Bromo Fun Tracking dan Bromo Forest di mana wisatawan dimanjakan oleh keindahan dan keasrian lingkungan

Kecamatan Puspo yang letaknya berdekatan dengan Kecamatan Tosari dan Tujur juga memiliki karakteristi potensi lingkungan yang serupa. Kondisi lingkungan yang masih asri dan menjadi daya Tarik lingkungan bagi wisatawan. Selain itu, terdapat destinasi wisata air terjun Rambut Moyo yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana wisata buatan. Namun demikian potensi tersebut belum dimanfaatkan akibat pengelolaan yang tidak optimal oleh pengelola wisata air terjun di sekitar BTS.

Kecamatan Purwodadi melalui kebun raya Purwodari memiliki potensi lingkungan sebagai konservasi tanaman sehingga kondisi lingkungan sudah diatur sedemikian rupa agar mendukung fungsi konservasi yang dimaksud. Selain itu, Desa Tambaksari kecamatan Purwodadi menyimpan potensi lingkungan yang masih asri. Saat ini potensi lingkungan yang terdapat di desa telah dimanfaatkan untuk wahana wisata buatan yakni jeep adventure serta budidaya tanaman alpukat.

Potensi lingkungan di sekitar destinasi wisata ke Kecamatan Purwosari cukup beragam karena jenis daya

Tarik wisata yang berbeda. Pertama terdapat UPTD Budidaya ternak yang memiliki kegiatan pengolahan limbah ternak dalam rangka menjaga kesuburan tanah sehingga mampu menghasilkan tambahan pakan ternak. Kemudian terdapat destinasi yang memanfaatkan kondisi aliran sungai seperti Rafting Kali Jempingan dan Eduwisata Kembang Kuning. Selain itu terdapat Wisata Edukasi dan Resort Kebun Pak Budi yang memiliki keindahan alam dan lingkungan serta telah dimanfaatkan untuk menambah atraksi wisata buatan seperti flying fox dan camping ground.

Potensi lingkungan di Kecamatan Sukorejo khususnya di desa Wonokerto adalah memiliki tanah yang subur sehingga menghasilkan manga dan beberapa produk pertanian yang sangat melimpah. Selain itu, terdapat wisata kebun kurma di mana telah di set sedemikian rupa agar sesuai untuk budidaya dan konservasi tanaman kurma.

Potensi Sosial Pariwisata Pendukung BTS

Potensi sosial ditunjukkan oleh keberadaan kerekatan antar individu atau kelompok masyarakat. Secara umum disekitar wisata Kecamatan Tukur memiliki kondisi masyarakat yang sangat ramah dan senantiasa bekerja sama dalam beberapa kesempatan. Hal tersebut diantaranya terdapat panen dan tanam hasil tani yang dilakukan secara Bersama – sama baik oleh warga maupun pengelola destinasi wisata. Adapun beberapa destinasi lainnya belum melibatkan banyak interaksi dengan warga sehingga belum tampak jelas potensi sosial yang dimiliki dalam rangka pengembangan wisata.

Kecamatan Tosari sebagai wilayah yang memiliki desa wisata berdasarkan keputusan Bupati, sudah memiliki kesadaran wisata sehingga kerekatan antar warga dan wisatawan sangat tinggi. Selain itu, kegiatan gotong royong juga diimpementasikan khususnya pada saat penanaman dan panen mengingat mayoritas penduduk merupakan petani.

Kecamatan Puspo memiliki karakteristik interaksi masyarakat yang serupa dengan desa lainnya yakni hubungan sosial yang erat satu sama lain. Hal tersebut ditunjukkan oleh kegiatan panen dan tanam bersama antar warga. Bahkan beberapa menunjukkan tindakan kolektif yang cukup kuat melalui pengelolaan Air Terjun Rambut moyo yang selama ini tidak di rawat dengan optimal

Potensi sosial di kecamatan Purwodadi ditunjukkan oleh keberadaan desa Tambaksari yang sebagai salah satu desa yang berkomitmen memajukan kegiatan wisata-nya. Sebagaimana desa lain, keeratan antar warga sangat tinggi dan warga lokal bersedia berpartisipasi sebagai pelaku wisata khususnya penyedia jasa homestay di mana wisatawan dan warga tinggal bersama dalam satu atap dalam jangka waktu tertentu.

Potensi sosial di kecamatan Purwosari ditunjukkan oleh Unit Peternakan Aliansi (UPTD Budidaya Ternak) yang masih erat dan rukun antar warga dan juga pengelolanya sehingga banyak kerja sama yang dilakukan secara berkala dalam berbagai bentuk. Keberadaan desa Kertosari yang sebagai salah satu desa yang berkomitmen memajukan kegiatan wisata-nya. Selain itu di Desa Kertosari, kegiatan gotong

royong juga diimplementasikan khususnya pada saat penanaman dan panen mengingat mayoritas penduduk merupakan petani.

Potensi sosial di kecamatan Sukorejo ditunjukkan oleh Desa Wonokerto yang memiliki sifat kekeluargaan yang masih kuat meskipun wisatawan bukan bagian dari keluarga, kegiatan gotong-royong juga diimplementasikan khususnya pada saat penanaman dan panen mengingat mayoritas penduduk merupakan petani. Di Wisata Kebun Kurma sendiri terdapat partisipasi masyarakat melalui karang taruna khususnya dalam pengelolaan lahan parkir.

Potensi Budaya Pariwisata Pendukung BTS

Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan memiliki potensi budaya dalam destinasi wisata Omah Kopi yang mana masih memiliki budaya ngopi desa. Di Desa Kalipucang sendiri masih banyak ditemukan budaya tradisional seperti jaranan, bantengan, dan pencak silat.

Potensi budaya yang dimiliki Kecamatan Tosari sendiri dapat ditemui di Desa Podokoyo yang mana akan banyak menemui upacara-upacara adat yang masih lekat di daerah tersebut. Terdapat beberapa upacara adat, seperti Upacara Adat Karo, Upacara Kasodo, Adat entas-entas, Adat Barikan, dan Acara Leliwet. Selain Desa Podokoyo, upacara adat seperti itu dapat ditemui juga di Desa Wonokitri yang memiliki upacara adat dan kegiatan adat yang serupa dengan Desa Podokoyo.

Kecamatan Puspo khusus nya di Desa Puspo sendiri memiliki potensi budaya yang tak jauh beda

dengan Kecamatan Tosari. Dapat ditemui potensi budaya seperti Upacara Adat Karo, Upacara Kasodo, Adat Entas-Entas, Adat Barikan, dan Adat Leliwet. Namun kegiatan adat yang berbeda dapat ditemui di Desa Keduwung yang memperlihatkan potensi budaya yang lebih banyak, seperti kegiatan Upacara Pujan, Upacara Hasil Bumi, Upacara Adat Unan-Unan, Tari Sodor, Tari Ujung, dan Gending Surobalen.

Potensi yang dimiliki Kecamatan Purwodadi dapat ditemui di Desa Tambaksari. Dapat ditemui kegiatan seperti Tradisi Sedekah Bumi dan Jamasan Gongso yang terdapat pada desa tersebut. Cara Adat Unan-Unan, Tari Sodor, Tari Ujung, dan Gending Surobalen. Kecamatan Purwosari sendiri memiliki potensi budaya khususnya di Desa Kertosari. Layaknya Desa Tambaksari di Kecamatan Purwodadi, Desa Kertosari juga memiliki tradisi yang sama yaitu Tradisi Sedekah Bumi. Berbeda dengan kecamatan lainnya, Kecamatan Sukorejo belum memiliki potensi budaya yang mampu diunggulkan layaknya kecamatan lainnya. Dalam Desa Wonokerto sendiri belum memiliki potensi budaya yang spesifik, hal yang sama juga dapat dilihat pada Wisata Kebun Kurma Kecamatan Sukorejo.

2. Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang tidak semua kecamatan terdapat tempat wisata, adapun di Kabupaten Lumajang kecamatan yang mempunyai daya tarik wisata sebagai berikut.

Kabupaten Lumajang mempunyai beberapa tempat pariwisata alam yang terletak di sebelah selatan Gunung Semeru, antara lain Air Terjun Kapas Biru yang terletak di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo.

Prasarana jalan untuk menuju air terjun Kapas Biru ini dapat menggunakan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Penginapan berupa homestay tersedia. Selain air terjun kapas biru juga terdapat air terjun kabut pelangi. Air Terjun Kabut Pelangi terletak di Desa Pronojiwo kecamatan Pronojiwo Lumajang. Dinamakan Air Terjun Kabut Pelangi karena mungkin di sini kondisinya sering berkabut, dan apabila mendapat momen yang pas kita juga bias menyaksikan pelangi di dasar jatuhnya air. Cara menuju ke lokasi air terjun kabut pelangi adalah jalan masuk yang bersebelahan dengan polsek Pronojiwo dan mengikuti petunjuk ke coban Kabut Pelangi. Untuk masuk ke Air Terjun Kabut Pelangi kita akan dikenakan biaya retribusi sebesar Rp.5000 dan biaya parkir Rp.5000 juga. Lanjut dari tempat parker menuju lokasi Air Terjun Kabut Pelangi kurang lebih hanya berjarak 2 kilometer saja. Sampai di lokasi air terjun triper akan disuguhkan pemandangan air terjun yang sangat cantik dengan debit yang lumayan deras serta tebing yang indah pula. Bagi triper yang ingin berkunjung ke Air Terjun Kabut Pelangi ini disarankan pada sekitar jam 9-11, ada kemungkinan jam tersebut triper semua bias menyaksikan pelangi yang dimaksud. Air Terjun Kabut Pelangi Lumajang memiliki tinggi kurang lebih 100 meter dan berada di dataran dengan ketinggian sekitar 1229 mdpl, menjadikan objek wisata air terjun tersebut terlihat sangat indah, Air Terjun Kabut Pelangi bisa menjadi alternatif wisata lain jika kamu sudah bosan dengan air terjun tumpak sewu dan kapas biru. Untuk sampai ke lokasi air terjun kita akan melewati jalur dengan medan naik turun khas perbukitan, walaupun begitu banyak

wisatawan yang tetap ingin melihat pesona keindahan Air Terjun Kabut Pelangi ini, rasa lelah akan terbayar setelah kita sampai di lokasi air terjun, pemandangan alam dan udara sejuk dikawasan wisata tersebut siap menyambutmu.

Demikian pula di Kecamatan Pronojiwo Desa Sidomulyo terdapat air terjun Tumpak Sewu merupakan wisata alam yang cukup indah, menarik dan terkenal sampai mancanegara. Untuk menuju ke lokasi air terjun tersebut dapat menggunakan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Di lokasi air terjun terdapat fasilitas penginapan berupa homestay maupun hotel, jumlahnya pun cukup banyak tersedia. Air terjun tumpak sewu ini sebenarnya terletak di perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Lumajang merupakan wilayah Desa Sidomulyo kecamatan Pronojiwo, sedangkan di Kabupaten Malang terletak di Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading. Karena Air terjun yang terletak di dua wilayah antara Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang menjadi rebutan, saling mengklaim. Masih di wilayah Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo terdapat Gua Tetes, letak Gua Tetes ini perdekatan dengan Air Terjun Tumpak Sewu. Air terjun Tumpak Sewu maupun Gua Tetes jarak dari Kota Lumajang sekitar 50 km dan dari Kota Malang Sekitar 45 km. Menuju kedua lokasi tersebut dapat ditempuh dengan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) melalui jalan provinsi. Daya tarik wisata air terjun ini di Juluki Niagara Mini Indonesia. Julukan itu memang tepat karena daya tarik wisata ini sangat menarik mulai dari sisi keindahan panorama alamnya yang membuat kita seperti terbawa mimpi ke negeri

Paman Sam. View point air terjun ini memiliki ekстетika panorama keindahan yang sangat memikat hati para pengunjung. Sepanjang perjalanan ini mata anda akan dimanjakan oleh Hijaunya alam yang ada di sepanjang jalan tebing Tumpak sewu serta anda akan di sambut oleh suara gemericik air terjun kecil sepanjang jalan menuju sumber mata air Tumpak Sewu Semeru.

Goa Tetes Pronojiwo Lumajang sebenarnya juga merupakan wisata air terjun. Namun di sela-sela air mengalir terdapat cekungan tanah besar membentuk goa dan mencolok, maka lokasi ini lebih termashur dengan wisata goanya. Sederhana saja, sejarah Goa Tetes Lumajang ini terbentuk karena air yang mengalir dari atas tebing meresap kemudian menetes di sepanjang atap goa. Sebuah wisata goa yang didalamnya dipenuhi dengan keragaman stalagmit dan stalagtit yang eksotis. Stalagtit merupakan batuan berujung lancip yang menggantung di langit-langit goa. Di Goa ini, Stalagtit berjumlah banyak dan meneteskan air yang tidak pernah berhenti. Sedangkan Stalagmit merupakan batuan berujung lancip yang muncul di dasar goa atau lantai goa. Kedua fenomena alam yang amat indah ini bisa ditemukan didalam goa mungil di Kabupaten Lumajang. Peristiwa alami tersebut yang menjadi asal usul Goa Tetes diberi nama GOA TETES, yaitu tetes air yang mengalir dari air terjun. Goa ini memiliki warna kuning keemasan. Warna tersebut tercipta karena adanya bebatuan di sekeliling goa yang tercampur dengan belerang. Meskipun perjalanan menuju lokasi Goa sedikit melelahkan, namun semua itu akan terbayar dengan panorama pemandangannya yang ada di sepanjang jalan, sehingga perjalanan pun

terasa menyenangkan. Ketika anda menyusuri jalan setapak yang menuju lokasi wisata, anda akan menjumpai panorama tebing, tumbuh-tumbuhan dan lumut yang cantik. Banyak sekali mitos yang beredar di masyarakat Lumajang, khususnya warga pronojiwo mengenai Goa Tetes ini. Mitos tersebut tidak lain adalah tentang asmara. Konon katanya barang siapa yang berkunjung dan mandi menggunakan air yang ada di goa ini dapat membuat seseorang tersebut menjadi tampak awet muda.

Wisata pantai juga terdapat di Kabupaten Lumajang antara lain pantai Wotgalih. Pantai Wotgalih terletak di Kecamatan Yosowilangun, Desa Wotgalih. Di Desa tersebut terletak dibibir pantai sangat asik di kunjungi saat mentari pagi hari atau saat sore hari. Di pagi harinya anda bisa melihat aktifitas nelayan yang salah satunya adalah pokok mata pencaharian di Desa tersebut yang menjala di sepanjang bibir pantai. Pengunjung disuguhkan pemandangan yang luar biasa, karena pasir disini sangat halus, bersih dan hitam. Nhakan, pasir hitam di Pantai Wotgalih dikenal dengan pasir besi yang mengandung mineral tambang bermutu tinggi. Ombak pantai Wotgalih juga sangat menakjubkan, merupakan ombak berlapis karena gulungan ombak seakan-akan berkejaran untuk saling mendahului. Warna air lautnya pun sangat eksotik dengan bibir pantai yang mendengar. selain keindahan pantai, kita juga bisa melakukan aktifitas memancing di sungai payau dekat jembatan bambu.

Selain itu di Kabupaten Lumajang terdapat banyak wisata pemandaian antara lain pemandian alam tirtosari view terletak di desa Penanggal (Dsn.

Sumbersari), Kecamatan Candipuro. Pemandian tirtosari merupakan pemandian alam yang masih sangat alami. Menuju tempat wisata ini cukup mudah. Sama dengan jalur menuju hutan bambu dan gunung sawur. Tetapi dari hutan pinus/mahoni belok kekanan dan mengikuti jalan beraspal. Jalur yang dilalui juga lumayan enak. Pemandian ini berada di kanan jalan dan masuk sekitar 200 meter dari jalan aspal. Disini akan di suguhi tambak ikan, sawah, dan kelapa ditengah ladang yang sayup ditiup angin. Gemercik air menetes deras dari kolam utama pemandia ini. Airnya yang berasal dari sumber mata air yang sangat jernih sangat dingin hingga menusuk tulang. Terdapat hutan bambu di sekitar wilayah ini, sehingga selain bisa mandi di pemandian, kita juga bisa berkeliling di hutan bambu yang memang merupakan rumah bagi para monyet dan kelelawar. Salah satu Daya Tarik Wisata khas Lumajang dapat dinikmati disini dari tempat duduk di sekitar pemandian.

Demikian juga di Kabupaten Lumajang terdapat Pemandian Tirtowono, desa Jarit (Ds. Kebonsari), kecamatan Candipuro. Pemandian Tirtowono bisa jadi pilihan untuk berendam saat liburan. Air yang berasal dari sumber mata air asli di lereng gunung semeru membuat orang berendam akan merasakan kesegaran yang tak terhingga. Pemandian ini dilengkapi dengan kolam dewasa dan anak-anak, sehingga cocok menjadi salah satu pilihan bagi wisata untuk keluarga. Disamping pemandian juga dibangun taman-taman bunga dan anggrek, sehingga sangat cocok untuk berfoto dengan pemandangan alam yang masih asri dengan latar belakang hutan. Di sekitar pemandian

masih tahap pembangunan untuk menunjang kelengkapan fasilitas yang ada di pemandian Tirtowono diantaranya warung makan, pusat oleh-oleh dan juga pengembangan wahana permainan menarik (outbond).

Di Kecamatan Candipuro juga terdapat Wisata Hutan Bambu. Hutan Bambu ini terdapat di desa Sumbermujur. Kabupaten Lumajang sangat kaya dengan hutan yang masih asri, salah satunya Hutan Bambu dengan sumber mata airnya dimanfaatkan bagi warga untuk mengaliri pertanian. Daya tarik wisata ini memadukan pesona alam dan buatan, terdapat sekitar 3 ha tumbuhan bambu, terdapat populasi kera dan kelelawar, selain itu terdapat wisata buatan yakni kolam untuk mandi yang berasal dari sumber mata air kaki Gunung Semeru. Bagi Pecinta kuliner, ada beberapa kedai warga yang menyediakan Krecek Bung. Kuliner Khas Lumajang yang berbahan dasar dari tunas pohon bambu yang masih muda. Kemudian diolah dengan bumbu khusus, sensasi renyah dari masakan ini yang menjadi favorit bagi pengunjung.

Di Lumajang terdapat Wisata Ranu Bedali yang terletak di desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso. Ranu Bedali terletak di Ranu Bedali merupakan rangkaian dari tiga danau yaitu Ranu Bedali, Ranu Klakah dan Ranu Pakis. Sebagai rangkaian kawasan Segitiga Ranu, dengan jarak 7 Km dari Ranu Pakis atau 6 Km dari Ranu Klakah. Objek wisata Ranu Bedali ini mempunyai ketinggian 700 M dari permukaan laut dengan luas danau 25 Ha dan kedalaman 28 m. Damai Terasa di Ranu Bedali Hijau, rimbun, dan rindang adalah kesan pertama datang di salah satu dari tiga segitiga ranu di Lumajang. Pepohonan yang banyak

menghijaukan kawasan wisata alam satu ini. Danau yang berwarna hijau seolah menambah kesejukan mata seiring dengan angin daerah pegunungan yang mengalir sepoi-sepoi. Berada di ketinggian bukit dengan melihat air yang tenang berwarna kehijauan alga dibawah memberikan kesan tersendiri dalam mengunjungi destinasi wisata Lumajang. Jalan yang dilewati cukup sulit, jalan beraspal sampai Ranuyoso saja. Menjangkau masuk kawasannya harus melewati hutan bambu dengan kondisi jalan yang masih makadam. Tapi santai. Insya Allah aman kok. Banyak perumahan warga di kanan dan kiri. Sesekali beberapa meter berjalan kita akan melewati ladang milik warga yang banyak ditanami tanaman jenis kacang kacangan dan umbi umbian seperti ketela pohon dan ketela rambat. Well setelah kita sampai di kawasan ranu bedali, kita disambut oleh tugu yang baru saja jadi. Ranu bedali selamat datang. Dari kejauhan terlihat cekungan besar diantara bukit disekitarnya. Semakin mendekat kita akan bisa melihat danau hijau dibawah. Ketinggian tempat ini 700 mdpl cukup sejuk ketika siang hari meskipun matahari menyengat kulit. Estmasi Kedalaman dari atas bukit sekitar 100 meter. Tapi kedalaman ranunya sendiri hanya berkisar 28 meter saja. Pemandangan yang disuguhkan disana memang sangat indah. Anda bisa juga turun kebawah dengan melewati tebing curam. Dibawah kita bisa mendekat ke airnya yang berwarna kehijauan. Airnya yang tenang merupakan ciri khas Ranu Bedali. Banyak warga sering mencari kerang dan ikan disini.

Disamping wisata alam, terdapat wisata religi yaitu Pura Mandara Giri Semeru Agung terletak di desa

Senduro, Kecamatan Senduro. Pura ini merupakan tempat ibadah bagi agama hindu yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Selain wisata religi di desa Argosari Kecamatan Senduro terdapat pemandangan alam yang bernama B-29. Daya Tarik Wisata B29 merupakan puncak tertinggi di kawasan lautan pasir bromo, pemandangan yang indah dan udara dingin sebagai tempat untuk melihat pemandangan gunung bromo dari kabupaten Lumajang ditambah hamparan tanaman khas dataran tinggi berupa bawang pre, kubis dan kentang serta tak kalah indahnnya kita disuguhkan pemandangan yang berupa rumah adat suku tengger dan cara berpakaian adat budaya suku tengger yang khas di Desa Argosari. Obyek Wisat B-29 ini terletak perdekatan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo yang pernah menjadi rebutan (konflik) antara Kabupaten Lumajan dan Kabupaten Probolinggo, sejak beberapa tahun terkahir ini daya tarik wisata B-29 oleh Kabupaten Lumajang di pindah atau digeser lokasinya ke Wilayah Lumajang. Sedangkan Kabupaten Probolinggi mendirikan obyek wista berupa P-30 (Puncak 30).

Ada pula pemandian buatan yaitu Kayu Batu, terletak di Desa Pulo (Dsn. Dawuhan) Kecamatan Tempeh. Daya Tarik Wisata Kayu Batu merupaka daya tarik wisata buatan atau pemandian buatan dan sangat diminati oleh para anak-anak sekolah dan banyak dikunjungi wiisata keluarga. Pemandian Kayu Batu adalah merupaka air sumber yang mengalir sangat deras. Masih berupa wisata pemandian di Kabupaten Lumjang terdapat pula wisata pemandaian bernama Pemandian Joyokarto yang terletak di desa Jokarto

Kecamatan Tempeh. Pemandian yang dikemas modern ini letaknya di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh, walaupun lokasinya di desa namun tidak kalah indah dan menarik seperti waterpark yang ada di Kawasan Wonorejo Terpadu (KWT). Bahkan mungkin lebih nyaman dan enjoy dengan banyaknya joglo dan tempat duduk bagi pengunjung dengan 2 buah pohon beringin sebagai tempat rehat dan bersantai. masih ditambah lagi dengan ruangan-ruangan untuk sekedar merebahkan badan sambil menunggu kerabat yang sedang berenang dan sebagainya. Pemandian ini memiliki 3 kolam dengan kategori balita, anak-anak dan dewasa dengan arsitektur modern yang membuat mata enak memandangnya dan betah berlama-lama disini. Dengan berbagai fasilitas yang ada menjadikan tempat ini layak menjadi tujuan rekreasi di Lumajang. Ada pula daya tarik wisata lainnya yang bernama Air Terjun Trap Sewu terletak di desa Bodang, Kecamatan Padang. Dari pusat kota Luamjang sampai lokasi daya tarik wisata jalan beraspal. Sedangkan jalan ke lokasi wisata sudah dicor dengan beton dan akses ke lokasi bawah juga sudah diberi trap cor. Jarak dari tempat parkir ke lokasi air terjun \pm 150 M.

3. Kabupaten Malang

Potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Malang sangat besar. Terdapat 63 (enam puluh tiga) daya tarik wisata yang terdiri dari daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus yang sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan, maupun daya tarik wisata yang belum dikembangkan yang terletak baik di kawasan konservasi maupun bukan di kawasan konservasi. Disamping itu setiap tahun di Kabupaten

Malang diselenggarakan 26 (dua puluh enam) event daerah yang masuk dalam Calender of events 2018 baik berupa event keagamaan, event hari besar nasional, maupun event seni budaya dan adat tradisi, yang kesemuanya dapat dijadikan event atraksi wisata. Diantaranya yaitu event: Malang Beach Festival (MBF), HUT Kabupaten Malang, Event Pesona Desa Wisata, Event Selancar, Event Batik Beach Fashion, dan lain-lain. Potensi event wisata tersebut ditunjang oleh Kabupaten Malang yang memiliki daya tarik seni budaya yang kaya dengan ragam seni budaya dan adat tradisi dari pengaruh budaya Jawa, dan budaya arek, terdapat banyak sanggar seni budaya, seni topeng Malangan, dan seni mocapat Tumpang Malangan yang tumbuh di masyarakat, serta ditunjang sikap keramatomahan masyarakat dan sifat yang relatif lebih terbuka terhadap unsur budaya wisatawan. Berikut potensi daya tarik wisata:

Potensi daya tarik wisata alam di wilayah Kabupaten Malang terletak di kawasan konservasi dan bukan di kawasan konservasi. Kawasan konservasi dimaksud berada dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Terdapat 22 (duapuluh dua) daya tarik wisata alam, yaitu: (1). Wisata TNBTS, (2). Air Terjun Sumber Pitu, (3). Air Terjun Trisula, (4). Coban Kembar, (6). Coban Pelangi, (7). Coban Rondo, (8). Pantai Bajulmati, (9). Pantai Balekambang, (10). Pantai Clungup, (11). Pantai Jonggringsaloko, (12). Pantai Legoksono, (13). Pantai Ngantep, (14). Pantai Nglipyep, (15). Pantai Ngudel, (15). Pantai Pasir Putih, (16). Pantai Tamban, (17). Pantai Ungapan, (18).

Pantai Wonogoro, (19). Sumber Jenon, (20). Sumber Sirah, (21). dan (22). Ranu Sosro.

Potensi daya tarik wisata budaya di wilayah Kabupaten Malang, berupa situs peninggalan sejarah dan purbakala. Terdapat 13 (tigabelas) daya tarik wisata budaya, yaitu: (1). Arca Dwarapala, (2). Arca Ganesa, (3). Candi Badut, (4). Candi Jago, (5). Candi Jawar, (6). Candi Kidal, (7). Candi Singosari, (8). Kraton Gunung Kawi, (9). Makam Mbah Bergas, (10). Makam Gunung Kawi, (11). Makam Seco Setuhu, dan (12). Sumber Nagan.

Potensi daya tarik wisata minat khusus Kabupaten Malang berpotensi untuk dikembangkan, sebab dukungan sumberdaya daerah utamanya sumberdaya alam (lahan, air, hutan dan udara) dan budaya sangat besar. Wisata minat khusus yang berpotensi dikembangkan yaitu: desa wisata, petualangan alam, agro wisata, pemandian, taman rekreasi, dan lain-lain. Terdapat 26 (duapuluh enam) daya tarik wisata minat khusus yang sudah dikembangkan di Kabupaten Malang, yaitu: (1). Desa Wisata Poncokusumo, (2). Desa Wisata Pujon Kidul, (3). Desa Wisata Purwodadi, (4). Desa Wisata Wonosari, (5). Desa Wisata Gubugklakah, (6). Desa Wisata Ngadas, (7). Kasembon Rafting, (8). Kondang Merak, (9). Kolam Renang Bonderland, (10). Ledok Amprong River Tubin, (11). Pemandian Dewi Sri, (12). Pemandian Kendedes, (13). Pemandian Metro, (14). Ledok Ombo, (15). Pemandian Kolam Watugede, (16). Pemandian Sumber Maron, (17). Pemandian Sumber Taman, (18). Pemandian Sumber Waras, (19). Rest Area Ngantang, (20). Taman Rekreasi Sengkaling, (21). Taman Wisata Air Wendit,

(22). Waduk Karangates, (23). Waduk Selorejo, (24). Wisata Blayu Lesti Lestari, (25). Agrowisata Apel, dan (26). Agrowisata Bunga Krisan;

Kabupaten Malang telah menyelenggarakan event atraksi wisata. Sebagaimana disebut diatas bahwa dalam setahun di Kabupaten Malang diselenggarakan 31 (tiga puluh satu) event daerah yang masuk dalam Calender of events 2018 baik berupa event keagamaan, event hari besar nasional, maupun event seni budaya dan adat tradisi, yang kesemuanya dapat dijadikan event atraksi wisata. Berikut event atraksi wisata yang masuk dalam Kalender Wisata di Malang, yaitu: (1). Jalanidhipuja Balekambang, Malang Beach Festival (MBF), (2). Grand Expo of Kabupaten Malang Anniversary, (3). Event Pesona Desa Wisata Grebeg Tengger Tirtoaji, (4). Event Selancar, (5). Event Batik Beach Fashion, (6). Kirab Budaya Agung, (7). Gumebyar Pesona Gunung Kawi, (8). Indonesia Marketers Festival, (9). Tasyakuran Petik Laut di Sendang Biru, (10). Lomba layang-layang, (11). Suroan Ceremony, (12). Indonesian Fashion Carnival Chapter Malang, (13). Paralayang di Pantai Medangan, (14). Bola Voli Pantai, (15). Festival Sinden, (16). Rafting Fair, (17). Syukuran Tamban Beach, (18). Jazz Music Performance, (19). Hotel Village Festival, (20). Wonderful Dewi Of Kabupaten Malang, (21). Canoe Ferstival, (22). Karo Ceremony of Ngadas Village, (23). Rally on of Jeep, (24). Pelangi Budaya, (25). Singhasari Literacy, (26). Underwater Photography, (27). Chef Parade, (28). Sesucen "Sedekah Bumi" Sanankerto, (29). Wonderful Gondanglegi, (30). Wayang Kulit

Performance, Grand hall of Kabupaten Malang, dan (31). Ngliyep Beach Labuhan.

Berdasarkan data usaha sarana akomodasi dari data Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015 di Kabupaten Malang dalam 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2014 dan 2015 jumlah usaha sarana akomodasi bertambah dari 31 unit dengan 663 kamar menjadi 244 unit dengan 1885 kamar dengan rincian: (1). Pada tahun 2014 usaha sarana akomodasi hotel bintang sejumlah 1 unit dengan kapasitas 61 kamar, hotel non bintang sejumlah 30 unit dengan kapasitas 602 kamar, sedangkan akomodasi lainnya bisa berupa pondok wisata, penginapan remaja, atau homestay sejumlah tidak tercatat atau tidak ada data, dan (2). Pada tahun 2015 usaha sarana akomodasi hotel bintang sejumlah 3 unit dengan kapasitas 205 kamar, hotel non bintang sejumlah 73 unit dengan kapasitas 1.368 kamar. Sedangkan akomodasi lainnya bisa berupa pondok wisata, penginapan remaja, atau homestay sejumlah 168 unit dengan kapasitas 312 kamar.

Usaha akomodasi pada tahun 2015 yang bertambah tersebut adalah unit hotel bintang bertambah 2 unit, jumlah kamar hotel bintang juga bertambah 144 kamar. Untuk jumlah hotel melati bertambah 43 unit, jumlah kamar hotel melati juga bertambah 766 kamar. Sedangkan akomodasi lainnya bisa berupa pondok wisata, penginapan remaja, atau homestay baru tercatat/terdata sejumlah 168 unit dengan kapasitas 312 kamar.

Data jumlah usaha makan minum berupa restoran dan rumah makan di kabupaten Malang dalam dua tahun terakhir, berdasarkan data Kebudayaan Dan

Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2014 dan Tahun 2015, jumlah restoran berkurang 3 unit usaha, namun jumlah kursi bertambah 120 kursi. Sedangkan jumlah usaha makan minum bertambah 4 unit usaha dengan jumlah kursi bertambah 285 kursi, rinciannya: (1). Pada tahun 2014 usaha restoran dan rumah makan berjumlah 190 unit usaha dengan 4.929 kursi, yang terdiri usaha restoran 5 unit usaha dengan 280 kursi, sedangkan jumlah usaha rumah makan terdapat 185 unit usaha rumah makan dengan jumlah kursi sebanyak 4.649 kursi, dan (2). Pada tahun 2015 usaha restoran dan rumah makan berjumlah sebanyak 194 unit usaha dengan 5.614 kursi yang terdiri dari Jumlah usaha restoran 2 unit usaha dengan 400 kursi, dan jumlah usaha rumah makan 193 unit usaha dengan 5.214 kursi.

Data usaha Jasa dan Perjalanan Wisata di Kabupaten Malang berdasarkan data dari Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2014 dan 2015 dalam 2 (dua) tahun terakhir tidak terdapat usaha jasa pariwisata. Usaha perjalanan wisata jumlah menurun 14 unit usaha, dengan rincian: (1) Pada tahun 2014 terdapat perjalanan wisata berjumlah 54 usaha, berupa 43 usaha Biro Perjalanan Wisata, 2 usaha cabang BPW dan 9 usaha Agen Perjalanan Wisata; dan (2) Pada tahun 2015 usaha perjalanan wisata berjumlah 40 unit usaha, yang terdiri dari 32 unit biro perjalanan wisata (BPW) dan 8 agen perjalanan wisata (APW), tidak terdapat cabang BPW. Usaha rekreasi hiburan umum (RHU) di Kabupaten Malang, berdasarkan data Buku Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015

berjumlah 96 unit usaha. Tidak semua jenis usaha RHU ada di Kabupaten Malang, jenis usaha RHU yang ada terdiri dari: 2 Taman Rekreasi, 9 Kolam Renang, 2 Lapangan Volly, 3 Lapangan Tennis, 9 Gedung Futsal, 8 Biliard, 27 arena permainan, 13 salon kecantikan, 17 Teater Tertutup, 5 Gelanggang Olah Raga, dan 1 Karaoke.

Destinasi Tempat Wisata di Kabupaten Malang paling banyak dikunjungi wisatawan Mancanegara dalam 4 Tahun, menunjukkan berturut-turut: (1). DTW TN. Bromo Tengger Semeru; (2). DTW Rest Area Ngantang; (3). DTW P; antai Balekambang; (4). DTW Kasembon Rafting; (5). DTW Candi Singosari ; (6). DTW Pantai Ngliyep; (7). DTW Waduk Selorejo; (8). DTW Cuban Rondo; (9). DTW Candi Jago; dan (10). DTW Agro Wisata Wonosari. Sedangkan 10 (sepuluh) DTW di Kabupaten Malang yang paling banyak dikunjungi wisatawan Nusantara dalam 4 Tahun, menunjukkan berturut-turut: (1). DTW Pantai Balekambang; (2). DTW Cuban Rondo; (3). DTW Agrowisata Wonosari; (4). DTW Taman Rekreasi Sengkaling; (5). DTW Rest Area Ngantang; (6). DTW Waduk Selorejo; (7). DTW Makam Gunung Kawi; (8). DTW Pemandian Dewi Sri; (9). DTW Cuban Pelangi; dan (10). DTW Taman Wisata Air Wendit. Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung menginap di akomodasi Kabupaten Malang dalam empat tahun terakhir trennya naik. Wisatawan Mancanegara yang menginap di akomodasi di Tahun 2015 sejumlah 7.066 orang, naik 56,92% bila dibandingkan dengan Tahun 2014 berjumlah 4.503 orang. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi di Kabupaten

Malang Tahun 2015 naik sangat drastis. Wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi dari sejumlah 217.591 orang bila dibandingkan tahun 2014 berjumlah 14.546 orang naik 1395%. Kenaikan data jumlah wisatawan nusantara tersebut diperkirakan berasal dari dimasukkannya data wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi homestay desa wisata Kabupaten Malang.

4. Kabupaten Probolinggo

Di Kabupaten Probolinggo Potensi Pariwisata sangat besar, Seperti halnya daya tarik wisata di Kabupaten Probolinggo, potensi daya tarik wisata sangat besar, baik yang sudah dikenal dan dikunjungi wisatawan, maupun daya tarik wisata yang belum dikembangkan yang terletak baik di kawasan konservasi maupun bukan di kawasan konservasi, namun belum dikembangkan secara optimal. Potensi daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Probolinggo terdapat sejumlah 55 daya tarik wisata, yang terdiri 16 daya tarik wisata alam, 4 daya tarik wisata budaya, dan 35 daya tarik wisata minat khusus. Namun berdasarkan data Buku Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015 terdapat 19 (sembilan belas) daya tarik wisata yang sudah dikembangkan dan di kunjungi wisatawan, terdiri dari daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Disamping itu setiap tahun di Kabupaten Probolinggo diselenggarakan 18 (delapan belas) event daerah yang masuk dalam Calender of events 2018 baik berupa event keagamaan, event hari besar nasional, maupun event seni budaya dan adat tradisi, yang kesemuanya dapat dijadikan event atraksi wisata. Diantaranya yaitu event: Yadya

Kasada, Eksotika Bromo, Jazz Gunung Bromo, Bromo Night Carnival, dan lain-lain. Potensi event wisata tersebut ditunjang oleh Kabupaten Probolinggo yang memiliki daya tarik seni budaya yang kaya dengan ragam seni budaya dan adat tradisi dari pengaruh budaya Jawa, dan budaya arek, terdapat banyak sanggar seni budaya, seni topeng Malangan, dan seni mocapat Tumpang Malangan yang tumbuh di masyarakat, serta ditunjang sikap keramatomahan masyarakat dan sifat yang relatif lebih terbuka terhadap unsur budaya wisatawan. Berikut potensi daya tarik wisata:

Potensi daya tarik wisata alam di wilayah Kabupaten Probolinggo terletak di kawasan konservasi dan bukan di kawasan konservasi. Kawasan konservasi dimaksud berada dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Terdapat 16 (enambelas) daya tarik wisata alam, yaitu: (1). Wisata Gunung Bromo, (2). Air Terjun Madakaripura, (3). Air Terjun Umbulan, (4). Air Cterjun Dewi Rengganis, (5). Air Terjun Darungan, (6). Ranu Segaran dan Air Panas, (7). Ranu Ronggojalu, (8). Ranu Agung Tiris, (9). Pantai Bentar, (10). Pantai Dutah, (11). Pantai Tambaksari Pajarakan, (12). Pantai Bahak Tongas, (13) Wisata Bahari Gili Ketapang, (14). Wisata Sungai Pekalen, (15). Wisata puncak Sari Lumbang, dan (16). Pundak Lembu P 30 Sumber.

Potensi daya tarik wisata budaya di wilayah Kabupaten Probolinggo, berupa situs peninggalan sejarah dan purbakala. Terdapat 4 (empat) daya tarik wisata budaya, yaitu: (1). Candi Jabung, (2). Candi Kedaton, (3). Adat Istiadat dan Budaya Tengger, dan

(4). Wisata Relegi Miniatur Kabah. Potensi daya tarik wisata minat khusus Kabupaten Probolinggo berpotensi untuk dikembangkan, sebab dukungan sumberdaya daerah utamanya sumberdaya alam (lahan, air, hutan dan udara) dan budaya sangat besar. Wisata minat khusus yang berpotensi dikembangkan yaitu: desa wisata, petualangan alam, agro wisata, pemandian, taman rekreasi, dan lain-lain. Terdapat 8 (delapan) daya tarik wisata minat khusus yang sudah dikembangkan di Kabupaten Probolinggo, yaitu: (1). Agrowisata Strawberry, (2). Agrowisata Sumberbendo, (3). Agrowisata Kebun Teh Andungbiru, (4). Regulo Lintas Nusantara Rafting, (5). Songa Alam Lestari Rafting, (6). Pandawa Nusantara Rafting, (7). Pemandian Jabung Tirta, (8). Desa Wisata Seruni Point Ngadisari, (9). Desa Wisata Wonotoro, (10). Desa Wisata Jetak, (11). Desa Wisata Ngadas, (12). Desa Wisata Sapikerep, (13). Desa Wisata Sariwani, (14). Desa Wisata Lumbang, (15). Desa Wisata Negororejo, (16). Desa Wisata Dungun, (17). Desa Wisata Giliketapang, (18). Desa Wisata Curahsawo, (19). Desa Wisata Banderan, (20). Desa Wisata Sukokerto, (21). Desa Wisata Kalibuntu, (22). Desa Wisata Randutatah, (23). Desa Wisata Segaran, (24). Desa Wisata Ranuagung, (25). Desa Wisata Andungbiru, (26). Desa Wisata Bremi, (27). Desa Wisata Guyangan, (28). Desa Wisata Ledokombo, (29). Desa Wisata Wonokerso, (30). Desa Wisata Banjarsawah, (31). Desa Wisata Condong, (32). Desa Wisata Taman, (33). Desa Wisata Sentul, (34). Desa Wisata Gading Wetan, dan (35). Desa Wisata Pakuniran.

Kabupaten Probolinggo telah menyelenggarakan event atraksi Wisata. Dalam setahun di Kabupaten Probolinggo diselenggarakan 18 (delapan belas) event daerah yang masuk dalam Calender of events 2018 baik berupa event keagamaan, event hari besar nasional, maupun event seni budaya dan adat tradisi, yang kesemuanya dapat dijadikan event atraksi wisata. Berikut event atraksi wisata yang masuk dalam Kalender Wisata di Kabupaten Probolinggo, yaitu: (1). Yadya Kasada, (2). HUT Kabupaten Probolinggo, (3). Eksotika Bromo, (4). Jazz Gunung Bromo, (5). Bromo Night Carnival, (6). Festival Sejuta Doa Dan harapan, (7). Event Perempuan Bersholawat , (8). Event Motorcross, (9). Pameran Pembangunan kabupaten Probolinggo, (10). Event Pencak Silat, (11). Event Paralayang, (12). Event Kraksaan Fair, (13). Event Kraksaan Color Run, (14). Event Eksotika Candi Jabung, (15). Event Festival Durian, (16). Event Pawai Ajaran Tahun Pelajaran, (17). Event Kraksaan City of Carnival, dan (18). Event Green Tourism Motor Touring.

Data usaha sarana akomodasi dari data Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015 di Kabupaten Probolinggo dalam 2 (dua) tahun terakhir Tahun 2014 dan 2015 jumlah usaha sarana akomodasi bertambah dari 23 unit dengan kapasitas 459 kamar menjadi 26 unit dengan kapasitas 846 kamar, rinciannya: (a) Pada tahun 2014 usaha sarana akomodasi tidak terdapat hotel bintang, hotel melati sejumlah 23 unit dengan kapasitas 459 kamar, dan tidak terdapat usaha akomodasi lainnya seperti: pondok wisata, penginapan remaja, atau homestay, dan (b). Pada tahun 2015

usaha sarana akomodasi tidak terdapat hotel bintang, hotel non bintang sejumlah 26 unit dengan kapasitas 846 kamar, tidak terdapat usaha akomodasi lainnya bisa berupa pondok wisata, penginapan remaja, atau homestay. Usaha akomodasi yang bertambah tersebut adalah unit usaha hotel non bintang bertambah 3 unit dengan kapasitas bertambah 387 kamar.

Data jumlah usaha berupa restoran dan rumah makan di Kabupaten Probolinggo dalam dua tahun terakhir, berdasarkan data Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2014 dan Tahun 2015 jumlah usaha restoran dan rumah makan bertambah 12 unit usaha dengan jumlah kursi bertambah 2.422 kursi dengan rincian: (1) Pada tahun 2014 usaha restoran dan rumah makan berjumlah 17 unit usaha dengan 925 kursi, yang terdiri usaha restoran 6 unit usaha dengan 265 kursi, sedangkan jumlah usaha rumah makan terdapat 11 unit usaha dengan jumlah kursi sebanyak 660 kursi, dan (2). Pada tahun 2015 usaha restoran dan rumah makan berjumlah 29 unit usaha dengan 3.347 kursi, yang terdiri dari 6 unit usaha restoran dengan 1.895 kursi, sedangkan jumlah usaha rumah makan terdapat 23 unit rumah makan dengan 1.452 kursi.

Data usaha Jasa Perjalanan Wisata di Kabupaten Probolinggo berdasarkan data dari Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2014 dan 2015 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan rincian: (1) Pada tahun 2014 usaha perjalanan wisata tidak tercatat baik usaha berupa Biro Perjalanan Wisata (BPW), cabang BPW maupun Agen Perjalanan Wisata; dan (2) Pada tahun 2015 usaha perjalanan wisata

berjumlah 4 unit usaha, yang terdiri dari 4 unit biro perjalanan wisata, tidak terdapat cabang BPW dan agen perjalanan wisata (APW).

Usaha rekreasi hiburan umum (RHU) di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan data dari Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015 berjumlah 11 unit usaha. Tidak semua jenis usaha RHU ada di Kabupaten Probolinggo, jenis usaha RHU yang ada terdiri dari: 2 Taman Rekreasi, 5 Kolam Renang, 3 Wisata Tirta, dan 1 Sarana Olah raga.

Jumlah daya tarik wisata di Jawa Timur berdasarkan data Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015 yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berjumlah 784 daya tarik wisata yang terdiri 265 daya tarik wisata alam, 320 daya tarik wisata budaya, dan 199 daya tarik wisata buatan yang sudah dikenal dan kunjungan wisatawan mancanegara dan atau wisatawan nusantara. Sedangkan jumlah daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Malang berjumlah 63 daya tarik wisata yang sudah dikenal dan kunjungan wisatawan mancanegara dan atau wisatawan nusantara, dan jumlah daya tarik wisata di Kabupaten Probolinggo berjumlah 18 daya tarik wisata yang sudah dikenal dan kunjungan wisatawan mancanegara dan atau wisatawan nusantara.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke daya tari wisata di lokasi pembahasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo dalam 4 tahun terakhir tahun 2012 – 2015 trend kunjungan wisatawan mancanegara naik – turun. Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara

ke Kabupaten Malang tahun 2015 terhadap Jawa Timur sangat bagus yaitu sekitar 32,75 % dan kontribusi kunjungan wisatawan nusantara terhadap Jawa Timur relatif cukup bagus yaitu sekitar 6,77 %. Sedangkan kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Probolinggo tahun 2015 terhadap Jawa Timur relatif cukup bagus yaitu sekitar 7,65 % dan kontribusi kunjungan wisatawan nusantara terhadap Jawa Timur relatif kecil yaitu sekitar 0,771 %.

Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara ke daya tarik wisata di lokasi pembahasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan data Kebudayaan Dan Pariwisata Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2015 yang diterbitkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam 4 tahun terakhir tahun 2012 – 2015 trend kunjungan wisatawan mancanegara naik – turun. Kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Malang tahun 2015 terhadap Jawa Timur sangat bagus yaitu sekitar 32,75 % dan kontribusi kunjungan wisatawan nusantara terhadap Jawa Timur relatif cukup bagus yaitu sekitar 6,77 %. Sedangkan kontribusi kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Probolinggo tahun 2015 terhadap Jawa Timur relatif cukup bagus yaitu sekitar 7,65 % dan kontribusi kunjungan wisatawan nusantara terhadap Jawa Timur relatif kecil yaitu sekitar 0,771 %.

Destinasi Tempat Wisata di Kabupaten Probolinggo paling banyak dikunjungi wisatawan Mancanegara dalam 4 Tahun terakhir, menunjukkan berturut-turut: (1). DTW Gunung Bromo (Ngadisari);

(2). DTW Regulo Alam Lestari Rafting; (3). DTW Agrowisata Strawberry; (4). DTW Candai Jabung; (5). DTW Pantai Bentar; (6). DTW Regulo Lintas Nusantara Rafting; (7). DTW Pandawa Nusantara Rafting; dan (8). DTW Air Terjun Umbulan. (9). DTW Air Terjun Madakaripura; dan (10). DTW Candi Kedaton. Sedangkan 10 (sepuluh) DTW di Kabupaten Probolinggo paling banyak dikunjungi wisatawan Nusantara dalam 4 Tahun, menunjukkan berturut-turut: (1). DTW Gunung Bromo (Ngadisari); (2). DTW Pantai Bentar, (3). Candi Jabung; (4). DTW Songa Alam Lestari Rafting; (5). DTW Air Terjun Madakaripura; (6). DTW Agrowisata Sumberbendo; (7). DTW Agrowisata Strawberry; (8). DTW Wisata Relegi Miniatur Kabah; (9). DTW Pandawa Nusantara Rafting; dan (10). DTW Wisata Alam Kebun Teh Andongbiru. Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jawa Timur menginap di akomodasi di Tahun 2015 sejumlah 612.412 orang, naik 32,10% bila dibandingkan dengan Tahun 2014 berjumlah 463.596 orang, dari jumlah tersebut 32,77% atau 200.657 orang datang melalui Bandara Juanda dan 67,23% atau 411.755 datang overland dari Jakarta, Jogjakarta atau Bali. Wisman yang terbanyak berkunjung ke Jawa Timur berasal dari Malaysia yang kedua Singapore baik sebagai penduduk luar negeri atau murni wisatawan mancanegara dari berwarga negara tersebut berasal, kemudian wisman dari China, Taiwan dan Jepang. Sedangkan wisatawan nusantara yang menginap di akomodasi di Jawa Timur Tahun 2015 sejumlah 8.382.198, naik 51,28% bila dibandingkan tahun 2014 berjumlah 5.540.815 orang, dari jumlah tersebut 39,38% diantaranya menginap di

hotel bintang yaitu 3.299.822 orang dan 60,62% menginap di hotel non bintang yaitu sejumlah 5.082.376 orang.

BAB V

MENGENAL TAMAN NASIONAL BROMO TEMGGER SEMERU

TNBTS merupakan kawasan bentukan dari kawasan Gunung Bromo, Gunung Semeru dan Kawasan Tengger yang dimana kawasan tersebut dibentuk menjadi taman nasional. Pada tahun 1982 kawasan tersebut ditetapkan menjadi taman nasional pada kongres di Bali dan baru diresmikan oleh pemerintah pada tahun 1992. TNBTS terletak di empat wilayah administrasi yaitu di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang. Balai Besar TNBTS dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pengelola resmi dari TNBTS dengan fungsi untuk mengelola urusan pemeliharaan maupun pariwisata yang dimana berada pada naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi salah satu dari 10 destinasi yang dimana kemudian dihapus dari program "10 Bali Baru", bukan berarti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gagal bersaing dalam program tersebut akan tetapi, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah dianggap mampu dan sudah berkelas internasional serta merupakan kawasan konservasi yang harus dijaga kelestarian dan keindahannya sehingga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dihapuskan dari program tersebut. Ketika dengan

adanya penghapusan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari program "10 Destinasi Bali Baru" itu akan berdampak positif. Pasalnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan konservasi sehingga akan lebih baik jika pengunjung yang terbilang terbatas karena dampak pasti dari program "10 Destinasi Bali Baru" adalah melonjaknya jumlah pengunjung. Jika dengan tingginya jumlah pengunjung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maka kawasan konservasi tersebut akan beresiko rusak kelestariannya.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikelola langsung oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dimana mendapatkan kewenangan khusus dari pemerintah pusat dan berada pada naungan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga tidak terlepas akan perumusan kebijakan yang dibuat untuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tugas dan fungsi yang dibuat dengan tujuan untuk pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menurut Rahma dalam (Malangvoice, 2016) bahwa untuk seluruh pendapatan dari sektor wisata langsung disetorkan ke pusat seluruhnya dimana berarti tidak ada sharing atau sejenisnya. Untuk kebijakan anggaran adalah kebijakan dari pemerintah pusat sepenuhnya dan Balai Besar hanya dapat mengajukan rencana program-program apa saja yang akan dilaksanakan.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan pengelolaan kawasan

Taman Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2016). Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga tidak terlepas dengan pemerintah daerah setempat atau di wilayah administrasi. Terdapat empat pemerintah daerah di wilayah administrasi tersebut, yakni Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dimana keempat pemerintah daerah tersebut juga mendapatkan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat untuk menunjang pengelolaan destinasi pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Secara spesifik sudah ada kerja sama antara Balai Besar TNBTS dengan masing-masing pemerintah daerah tersebut, dimana masing-masing pemerintah daerah kewenangan teknis ada pada masing-masing Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Oleh sebab itu, maka pembahasan ini ingin menganalisa tentang bagaimana kerja sama antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan masing-masing Pemerintah daerah dalam pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan bagaimana kerja sama keempat pemerintah daerah dalam menunjang pengelolaan Destinasi Pariwisata Terpadu di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Secara normatif, pembangunan jelas memiliki makna positif, untuk pembangunan dan untuk perbaikan. Namun pembangunan juga memiliki berbagai kepentingan tentang bagaimana orang, kelompok, negara, dan internasional ingin mencapai tujuannya dalam pembangunan yang diinginkan sehingga

kepentingan-kepentingannya dapat diakomodasi (Warjio, 2016).

Potensi daya tarik Wisata di empat daerah lingkaran Bromo Tengger Semeru

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak TNBTS dan pihak-pihak keempat pemerintah daerah serta didukung dengan beberapa hasil dokumentasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa daya tarik wisata di empat daerah lingkaran Bromo Tengger Semeru. Untuk mempermudah identifikasi, maka potensi daya tarik wisata tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni yang berada di dalam kawasan TNBTS dan yang berada di bawah kawasan TNBTS dimana keduanya difokuskan pada daya tarik wisata yang berada di perbatasan antara TNBTS dengan masing-masing daerah dan yang berbatasan antardaerah penyangga TNBTS.

Potensi Daya Tarik wisata Kabupaten Malang

Daya tarik wisata di Kabupaten Malang secara umum terbagi menjadi tiga kategori, yakni kategori alam, kategori budaya, dan kategori buatan, di kabupaten Malang hingga bulan 2021 tercatat terdapat 188 Daya Tarik Wisata yang terbagi dalam tiga kategori, yakni 104 wisata alam, 57 wisata budaya, dan 27 wisata buatan. Di Kabupaten Malang, kategori wisata alam yang berhasil diidentifikasi dalam pembahasan ini adalah wisata alam yang berada dalam kawasan TNBTS dan wisata alam yang berada di bawah TNBTS. Dari kategori wisata yang kedua ini terbagi menjadi dua kategori, yakni wisata alam yang berbatasan dengan TNBTS dan wisata alam yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Secara total

kategori yang berada di kawasan TNBTS dan sekitarnya yang berada di kabupaten Malang terdapat 11 wisata alam.

Bahwa wisata alam di kawasan TNBTS dan sekitarnya terdapat 11 wisata yang terdiri dari 7 wisata di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 3 wisata yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan 1 wisata yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang di bawah kawasan TNBTS.

Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Pasuruan

Berbeda dengan yang ada di Kabupaten Malang, Daya tarik wisata di Kabupaten Pasuruan secara umum terbagi menjadi enam kategori, yakni kategori alam, kategori minat khusus, kategori religi, kategori budaya, kategori agrowisata, dan kategori buatan, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Ani, Kepala Bidang Destinasi dan Promosi Wisata Kabupaten Pasuruan: Di kabupaten Pasuruan Daya Tarik Wisata yang terbagi dalam enam kategori, yakni wisata alam, wisata minat khusus, wisata religi, wisata budaya, wisata agro dan wisata buatan. Di kabupaten Pasuruan, untuk kategori yang dipakai dalam pembahasan ini data yang berhasil diidentifikasi hanya masuk kategori wisata alam yang berada dalam kawasan TNBTS dan wisata alam yang berbatasan dengan TNBTS. Adapun wisata alam di bawah TNBTS yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo tidak ada. Secara total kategori yang berada di kawasan TNBTS dan sekitarnya yang berada di kabupaten Pasuruan terdapat 7 wisata alam. Wisata alam Kabupaten Pasuruan yang berada di kawasan TNBTS dan sekitarnya terdapat 7 wisata yang terdiri dari 5

wisata di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan 2 wisata yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sedangkan wisata yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Malang berada di bawah kawasan TNBTS belum teridentifikasi dengan jelas.

Potensi Daya Tarik wisata Kabupaten Lumajang

Adapun daya tarik wisata di Kabupaten Lumajang secara umum juga terbagi menjadi tiga kategori, yakni kategori alam, kategori budaya, dan kategori buatan. Di kabupaten Lumajang hingga bulan Desember 2021 tercatat terdapat 130 Daya Tarik Wisata yang terbagi dalam tiga kategori, yakni 72 wisata alam, 37 wisata budaya, dan 21 wisata buatan.

Di Kabupaten Lumajang, kategori wisata alam yang berhasil diidentifikasi dalam pembahasan ini sama dengan yang berada di Kabupaten Malang, yakni wisata alam yang berada dalam kawasan TNBTS dan wisata alam yang berada di bawah TNBTS. Dari kategori wisata yang kedua ini terbagi menjadi dua kategori, yakni wisata alam yang berbatasan dengan TNBTS dan wisata alam yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo. Secara total kategori yang berada di kawasan TNBTS dan sekitarnya yang berada di kabupaten Lumajang terdapat 9 wisata alam. Wisata alam Kabupaten Lumajang yang berada di kawasan TNBTS dan sekitarnya terdapat 9 wisata yang terbagi menjadi 6 wisata di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 1 wisata yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan 1 wisata yang berbatasan dengan Kabupaten Malang di bawah kawasan TNBTS dan

1 wisata yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo di bawah kawasan TNBTS.

Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Probolinggo

Sedangkan daya tarik wisata di Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan terdapat 38 destinasi wisata. Di kabupaten Probolinggo hingga 2021 tercatat terdapat 38 Daya Tarik Wisata yang tersebar di seluruh kabupaten Probolinggo. Di Kabupaten Probolinggo, kategori wisata alam yang berhasil diidentifikasi dalam pembahasan ini sama dengan yang berada di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, yakni wisata alam yang berada dalam kawasan TNBTS dan wisata alam yang berada di bawah TNBTS. Dari kategori wisata yang kedua ini terbagi menjadi dua kategori, yakni wisata alam yang berbatasan dengan TNBTS dan wisata alam yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Secara total kategori yang berada di kawasan TNBTS dan sekitarnya yang berada di kabupaten Probolinggo terdapat 5 wisata alam.

Bahwa Wisata alam di wilayah Kabupaten Probolinggo khususnya yang terfokus pada kawasan TNBTS dan sekitarnya terdapat 5 wisata, yakni 2 wisata di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2 wisata yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan 1 wisata yang berbatasan dengan Kabupaten Malang di bawah kawasan TNBTS dan 1 wisata yang berbatasan dengan Kabupaten Lumajang di bawah kawasan TNBTS

BAB VI

PENGELOLAAN DESTINASI WISATA TERPADU

Dari keempat daerah penyangga TNBTS hanya pemerintah Kabupaten Pasuruan yang belum bekerja sama dengan Balai Besar TNBTS. Adapun kerja sama Balai Besar TNBTS dengan pemerintah kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Lumajang masih sebatas kerja sama pada aspek perawatan jalan akses menuju kawasan TNBTS. Dilihat dari banyaknya Obyek Daya Tarik Wisata di kawasan TNBTS yang secara administratif berada di wilayah empat daerah tersebut menjadi potensi ke depan untuk diadakan kerja sama pengelolaan Wisata Terpadu diantara pihak-pihak yang terkait.

Kerja sama antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Malang

Berdasarkan wawancara dengan staff bidang Pengelolaan wisata TNBTS di jelaskan bahwa Kerja sama antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Malang adalah mengenai pemanfaatan dan pengembangan jalan di dalam kawasan TNBTS. Beliau menjelaskan sebagai berikut :

Ada Perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar TNBTS dengan Kepala Dinas PUBM Kabupaten Malang sejak tahun 2020 yang meliputi pada aspek pertama

pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan bantengan-jemplang, Jemplang-Coban Trisula dan Jarak Ijo-Lajing; kedua penambahan bangunan pelengkap jalan berupa pembangunan dinding penahan tanah dan fasilitas jalan; ketiga perlindungan dan pengamanan kawasan (Wawancara 17 Mei 2023)

Lebih lanjut beliau mengemukakan, bahwa pendanaan dalam pembangunan jalan dilaksanakan dengan dana sepenuhnya dari APBN, berikut kutipan hasil wawancaranya:

Kerja sama ini dilaksanakan melalui pendanaan sepenuhnya dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedangkan pelaksanaannya dari Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang tepatnya terletak di kawasan Resort PTS Coban Trisula, seksi PTN Wilayah II (wawancara 17 Mei 2023)

Selanjutnya terkait banyaknya daya tarik wisata yang berada di kawasan TNBTS dan secara administratif berada di wilayah Kabupaten Malang, diantaranya Coban Pelangi, Coban Trisula, Coban Bidadari, Laut Pasir, Bukit Teletubies, Coban Cinde, dan Coban Jodo, tentang model kerja sama yang terbangun antara pihak pemerintah kabupaten malang dan pihak TNBTS dalam pengelolaan wisata-wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, untuk masuk ke kawasan TNBTS kita sediakan tiket masuk sebesar Rp. 5000. Retribusi ini merupakan pemasukan PAD kabupaten Malang. Sedangkan pihak TNBTS juga punya tiket sendiri bagi pengunjung yang masuk ke kawasan TNBTS. Adapun

wisata-wisata yang berada di dalam kawasan TNBTS tersebut mutlak dikelola oleh pihak TNBTS.

Dari hasil wawancara serta pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa obyek-obyek yang menjadi daya tarik wisata di dalam kawasan TNBTS yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Malang dikelola sepenuhnya oleh pihak Balai Besar TNBTS, sedangkan pihak Pemerintah Kabupaten Malang hanya menarik retribusi berupa biaya tiket masuk sebesar Rp. 5000 sebelum masuk ke pos utama TNBTS. Selain itu juga untuk pembangunan dan perawatan jalan yang menuju kawasan TNBTS pembiayaannya juga ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sedangkan pihak pemerintah Kabupaten Malang hanya sebagai pelaksana teknisnya melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Ketentuan kerja sama ini sudah diatur dalam Perjanjian kerja sama antara kedua pihak melalui Perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2020.

Kerja sama antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Kerja sama yang terjalin antara Balai Besar TNBTS dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih belum ada belum ada, hanya sebatas program saja, misalnya mendatangkan hiburan di wilayah TNBTS karena adanya kesulitan koordinasi dengan pihak pasuruan yang sering ganti personalianya di Organisasi Perangkat Daerahnya terutama yang berkaitan langsung dengan daya tarik wisata yakni di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan

yang terkait dengan perawatan dan pembangunan jalan yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh staf Balai Besar TNBTS sebagai berikut :

Memang kerja sama dengan Kabupaten Pasuruan sampai saat ini masih sebatas program-program acara saja yang ditampilkan di BTS sebagai hiburan buat pengunjung atau wisatawan saja. Memang kurang komunikasi dengan pihak pemerintah kabupaten pasuruan, karena setiap kita kesana bertemu dengan orang yang baru. Jadi menjelaskan lagi maksud kita dari awal. Padahal ini juga untuk kepentingan mereka juga. Bahkan beberapa bulan kemarin dari pihak DPRD Kabupaten Pasuruan datang ke kita menanyakan permasalahan yang menyebabkan belum terjalannya kerja sama secara resmi antara pihak pemda kabupaten pasuruan dengan Balai Besar TNBTS (wawancara 3 Mei 2023)

Kerja sama yang terjalin diantara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pihak Balai Besar TNBTS berjalan kurang efektif selain sering bergantinya pejabat yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan nampak disebabkan belum ada bersamaan persepsi yang sama di kalangan pejabat Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Seperti yang terungkap dalam wawancara dengan Kasubid Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan, sebagai berikut :

Jadi belum ada persepsi yang sama terkait kerja sama dalam pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten pasuruan dengan Balai Besar TNBTS dan Kabupaten lainnya bahwa selama ini memang memang belum ada koordinasi antar sektor dan dengan Balai Besar TNBTS. Jadi belum merasakan manfaat kerjasama dalam

pengelolaan daya tarik wisata. Kita ingin menginginkan kerja sama dalam hal promosi daya tarik wisata pada empat Kabupaten yang berada di wilayah TNBTS (Wawancara, 12 Mei 2023).

Kawasan wisata yang ada yang di Kabupaten Pasuruan dan banyaknya daya tarik wisata yang berada di kawasan TNBTS dan secara administratif berada di wilayah Kabupaten Pasuruan, diantaranya Bukit Cinta, Gunung Penanjakan, Bukit Kingkong, Laut Pasir, dan Bukit Teletubies, tentang model kerja sama yang terbangun antara pihak pemerintah kabupaten pasuruan dan pihak TNBTS dalam pengelolaan wisata-wisata tersebut, staf Bagian Destinasi Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa keberadaan TNBTS memang kurang memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah penyangganya, maka kita dari pemerintah daerah kabupaten pasuruan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kemudian berinisiatif untuk menarik retribusi berupa tiket masuk ke kawasan TNBTS sebesar Rp. 5000. Retribusi ini masuk ke dalam PAD kabupaten Pasuruan yang ada di jalur wonokitri. Sedangkan pihak TNBTS juga punya tiket sendiri bagi pengunjung yang masuk ke dalam kawasan TNBTS. Adapun wisata-wisata yang berada di dalam kawasan TNBTS sepenuhnya dikelola oleh pihak TNBTS, jadi tidak mempunyai kewenangan disana. (wawancara 12 Mei 2023).

Dari beberapa hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa obyek-obyek yang menjadi daya tarik wisata di dalam kawasan TNBTS yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan dikelola sepenuhnya oleh pihak Balai Besar TNBTS, sedangkan pihak

Pemerintah Kabupaten Pasuruan berinisiatif menambah PAD Kabupaten dengan menarik retribusi berupa biaya tiket masuk sebesar Rp. 5000 sebelum masuk ke pos utama TNBTS di daerah Wonokitri. Untuk kerja sama antara kedua pihak belum terjalin karena dari pemerintah kabupaten pasuruan sering ganti personalianya di Organisasi Perangkat Daerahnya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pariwisata, yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan yang berkaitan dengan perawatan dan pembangunan jalan menuju kawasan TNBTS, yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Realitas ini menjadi kendala utama dalam rangka koordinasi awal dalam menyusun draft kerja sama diantara kedua pihak.

Kerja sama antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Kerja sama yang terjalin dengan Kabupaten Lumajang lebih inten dan efektif jika dibandingkan dengan tiga (3) kabupaten lainnya terkait Kerja sama dengan Balai Besar TNBTS. Kerja sama yang terjalin langsung dengan dinas terkait, yakni kerja sama tentang pemeliharaan dan peningkatan jalan eksisting di kawasan TNBTS dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kerja sama juga terkait tentang penguatan fungsi kawasan TNBTS melalui program pengembangan Wisata Alam dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Staf dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai berikut:

Ada perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar TNBTS dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang meliputi pada aspek : perlindungan dan pengamanan kawasan; pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan Bantengan-Ranupani, Ranupani-Burno dan Penampungan-Gedog; lalu Pemasangan pagar pengaman serta rambu-rambu keselamatan; serta perencanaan, monitoring, dan evaluasi (Wawancara 17 Mei 2023).

Perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang meliputi: pemeliharaan Danau Ranu Pani; pembangunan fasilitas edukasi tanaman khas Ranu Pani ; Pusat edukasi untuk menunjang kebersihan terhadap obyek daya tarik wisata alam; pembangunan sarana dan prasarana wisata alam rest area di Ranu Pani ; pembangunan amphitheater untuk fasilitas atraksi seni dan edukasi berbasis konservasi dan budaya setempat; pembangunan camping ground dan sarana pendukung; pembangunan sarana dan prasarana wisata alam rest area di Bantengan ; pembangunan sarana prasarana wisata alam di Ireng-Ireng; pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan argosari, dan pembangunan bangunan konservasi tanah dan air.

Adapun pelaksanaan Kerja sama yang kedua pendanaan sepenuhnya dari APBD Kabupaten Lumajang, sedangkan pelaksanaannya dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas

Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun luas area yang dikerja samakan ini sepanjang 28.807 m² yang tepatnya terletak di Resort PTN Ranupani dan Resort PTN Senduro, seksi PTN Wilayah III.

Selanjutnya ketika disinggung terkait banyaknya daya tarik wisata yang berada di kawasan TNBTS dan secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lumajang, diantaranya Ranu Pane, Ranu Kumbolo, Ranu Regulo, Kawasan Pendakian Gunung Semeru, Air Terjun Antrukan, Senduro, dan Antrukan Jago, tentang model kerja sama yang terbangun antara pihak pemerintah Kabupaten Lumajang dan pihak BB TNBTS dalam pengelolaan wisata-wisata tersebut, staf dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang mengungkapkan :

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan tidak memberlakukan tarif masuk ke kawasan TNBTS namun hanya ada pengecekan perlengkapan pengunjung yang mau masuk ke kawasan TNBTS khususnya pengunjung yang mau melakukan pendakian di pos Ireng-Ireng dan Senduro. Pihak TNBTS memberlakukan tiket masuk ke kawasan TNBTS, karena wisata-wisata yang berada di dalam kawasan TNBTS tersebut sepenuhnya dikelola oleh pihak TNBTS. (wawancara 3 Mei 2023)

Obyek-obyek wisata di dalam kawasan TNBTS yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lumajang dikelola sepenuhnya oleh pihak Balai Besar TNBTS, sedangkan pihak Pemerintah Kabupaten Lumajang hanya mengecek perlengkapan pengunjung khususnya yang mau melakukajn pendakian. Pemerintah Kabupaten Lumajang

juga lebih fokus mengembangkan potensi wisata alam yang ada di sekitar Danau Ranu Pani tepatnya di desa ranu pani dan akses menuju desa tersebut. Banyak dinas yang langsung terkait dalam pengembangan wisata alam ini, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun untuk pembangunan dan perawatan jalan yang menuju kawasan TNBTS pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, sedangkan pihak pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai pelaksana teknisnya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kerja sama antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo

Kerja sama antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yakni dalam pemeliharaan dan peningkatan jalan eksisting di dalam kawasan TNBTS. Hal ini diungkapkan oleh Staf dari Balai Besar TNBTS yang menyampaikan sebagai berikut :

Adanya Perjanjian kerja sama antara Kepala BB TNBTS dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo bahwa perjanjian ini meliputi beberapa aspek, antara lain perlindungan dan pengamanan kawasan; pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan Ngadisari-Laut Pasi; perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Pelaksanaan Kerja sama ini didanai sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (wawancara 12 Mei 2023)

Kawasan TNBTS secara administratif berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, diantaranya laut pasir dan bukit Teletubies. Model kerja sama yang terbangun antara pihak pemerintah kabupaten Probolinggo dan pihak TNBTS dalam pengelolaan wisata-wisata tersebut, menurut staf Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Probolinggo, untuk masuk ke kawasan TNBTS kita tarik retribusi sebesar Rp. 5000. Retribusi ini untuk pemasukan PAD kabupaten, jadi ada portal sebelum masuk ke kawasan TNBTS di pos Seruni Poin

BAB VII

MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA

Dari hasil pembahasan yang dilakukan bahwa model kerja sama yang ada di kawasan Bromo Tengger Semeru masih sebatas kerja sama perbaikan dan peningkatan akses jalan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sementara kerja sama antar pemerintah daerah sebagai penyangga kawasan Bromo Tengger Semeru belum ada. Yang terjadi selama ini munculnya konflik kepentingan antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan pengelolaan wisata alam air terjun tumpak sewu/coban sewu yang keberadaannya di perbatasan antara dua daerah tersebut. Meski sejak tahun 2019 telah ada inisiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui bidang kerja sama pada biro administrasi pemerintahan untk memfasilitasi kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten/Kota penyangga kawasan Bromo Tengger Semeru, namun hingga kini masih belum ada realisasinya. Namun

demikian secara umum, pengelolaan Bromo Tengger Semeru

1. Dalam perspektif hukum dan administrasi, adanya landasan hukum yang digunakan dalam kerja sama pemanfaatan dan pengembangan jalan di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pengelolaan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) berlandaskan pada PERMENHUTRI nomor P.55/Menhut-II/2014 dan PERMENLHKRI nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017. Sedangkan dari Pemerintah daerah berlandaskan pada PERMENDAGRI nomor 22 tahun 2020 yang mana sebelum mengadakan Perjanjian Kerja Sama harus ada MOU dulu dengan Bupati sedangkan bagi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) cukup dengan Perjanjian Kerja Sama ketika melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah daerah setempat.

Hasil pembahasan dilapangan menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan sudah memperhatikan pentingnya transformation rules sebagai manifestasi pemenuhan kebutuhan daerah yang bekerja sama berdasarkan regulasi yang relevan. Dalam hal ini Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) dan Pemerintah Kabupaten yang ada disekitar Bromo Tengger Semeru menggunakan pendekatan "*outward Looking*" dalam rangka menyesuaikan regulasi dari perspektif pemerintah daerah setempat, sehingga mampu menciptakan, memelihara, dan memperbaiki serta mengembangkan jejaring kerja sama guna menjawab tantangan baru dalam penyediaan destinasi pariwisata terpadu bagi

publik khususnya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

2. Dalam perspektif Budaya kemasyarakatan perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan pemerintah daerah setempat masih belum melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Pihak masyarakat lebih banyak bergerak di bidang jasa usaha travel atau EO (event Organizer) ke wisata Bromo Tengger Semeru (BTS) yang berjalan sendiri-sendiri dengan benderanya masing-masing.

Hasil pembahasan di lapangan menunjukkan masih kurangnya representasi dari kolaborasi dengan masyarakat setempat untuk berbagi manfaat (*benefits*) dan berbagi pengalaman (*experience*) dari kerja sama secara komprehensif. Hal ini berimplikasi pada kurangnya partisipasi serta peran masyarakat lokal setempat sehingga kurang memberikan manfaat

3. Dalam perspektif organisasi, bahwa Perjanjian kerja sama antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) dengan pemerintah daerah yang ada di wilayah BTS dalam pelaksanaannya di dani sepenuhnya dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedangkan pelaksanaannya dari Pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait. Selain itu, Pemerintah daerah setempat juga menarik retribusi tiket masuk sebesar Rp. 5000-10000 sebelum masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Kenyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sekitar TNBTS belum mampu mengoptimalkan

potensi wisata di daerah masing-masing yang berada di luar kawasan TNBTS.

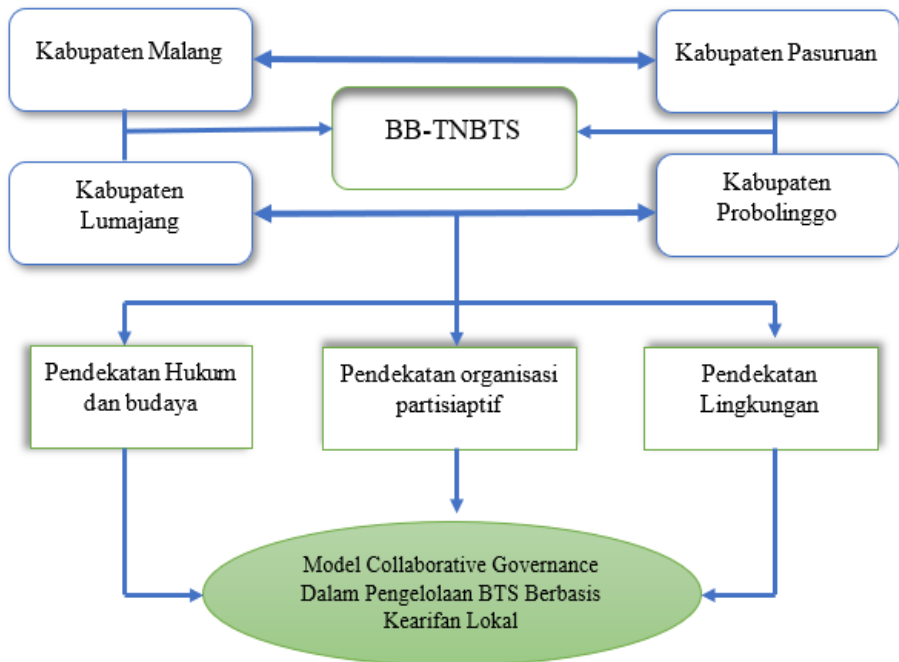
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sudah ada representasi adanya kesetaraan (*in-equality*) dalam pembagian hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Kerja sama yang terbangun akan lebih mampu mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkaitan erat dengan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, jika pemerintah daerah sekitar wilayah TNBTS mampu mengembangkan potensi daya tarik wisata di daerah masing-masing untuk menarik minat wisatawan. Dan saat ini pemerintah daerah Kabupaten yang berada di wilayah TNBTS sudah mulai mengembangkan potensi wisatanya berbasis keunggulan daerah atau berbasis pada potensi lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

4. Model kerja sama dalam pengelolaan Pariwisata Terpadu di kawasan TNBTS diarahkan pada adanya pembagian hak dan kewajiban diantara pihak yang terlibat dalam pengelolaan TNBTS baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dengan menggunakan *Pendekatan Lingkungan yang berbasis pada Potensi Lokal* secara detail dalam dokumen keputusan bersama dan terdistribusi secara seimbang pembagiannya.

Hasil pembahasan di lapangan merekomendasikan model kerja sama dimana perlunya diperhatikan pentingnya aspek "*equality in distribution of powers*" baik antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS), PERHUTANI dan masing-masing Pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dengan memperhatikan prinsip-prinsip equal partnership, sinergi, dan saling menguntungkan diantara pemerintah daerah yang bekerja sama.

Recommended Model Kerjasama TNBTS dengan Pemerintah Daerah



Gambar 7.1. Model Kerjasama TNBTS dengan Pemerintah Daerah

Keterangan Model adalah *Collaborative Governance* pada empat (4) Pemerintah Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Pasuruan melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam mengelola daya tarik wisata yang terutama berada di lingkaran TNBTS dengan

mengadakan promosi bersama destinasi wisata dan mengelola kerja sama lintas batas wilayah dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan memaksimalkan sumberdaya wisata serta meminimalkan konflik kepentingan, kerjasama yang dibangun berbasis pada potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Di dalam kerja sama tersebut untuk membangun model kerja sama yang bersinergi dengan tujuan menciptakan jejaring. Pihak-pihak yang berkonflik perlu menyepakati manajemen kolaborasi yang sinergis dalam bentuk kelembagaan badan otoritas/sekretariat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kerja sama, bahwa kerjasama yang dibangun harus bisa meningkatkan pendapatn daerah serta bisa membangun UMKM yang bisa mensejahterakan warga sekitar TNBTS.

Kerja sama dilakukan atas dasar prinsip saling menguntungkan diantara beberapa pihak yang terlibat dari aspek administrasi, kelembagaan, dan pembiayaan berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas. Melalui kerja sama, terjadi sinergitas antara masing-masing daerah dan menciptakan suatu inovasi bersama melalui collaborative governance yang dibangun. Beberapa pihak yang terlibat kerja sama melakukan interaksi yang intensif, berkesinambungan, dan berkoordinasi secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. dan Alison G. 2007. Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal Of Public Administration Research And Theory. University of California: Berkeley.
- Alfitra Perdana, V., Syafiqurrohman, A., Noor Cahyadi Eko Saputro, M., Aribah Hanif, N., Miftahul Ahsan, M., & Husein, R. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Covid-19 Studi Kasus : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 252-269. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11743>
- Agustina, D. (2018). Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Fprb) Diy Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(1), 87–103. <https://doi.org/10.31334/trans.v9i1.87>
- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Adminsitration Research and Theory. Published by Oxford University Press
- Bono. B. P. dan Pulungun. M. S., 2010, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta.
- Darwati, D., samad, muhammad ahsan, & Wekke, I. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan

- Integrated Community Shelter Pasca Bencana di Kota Palu. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7kjte>
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Eprilianto, D. F., Pradana, G. W., & Sari, Y. E. K. (2020). Digital Inovasi Sektor Publik : Efektivitas Kolaborasi Dalam Implementasi Inovasi Dega Digital. *Jurnal EL-RİYASAH*, 10(2), 127. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i2.8909>
- Harding, A. (2017). Devolution of Powers in Sarawak: A Dynamic Process of Redesigning Territorial Governance in a Federal System. *Asian Journal of Comparative Law*, 12(2), 257-279. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2017.13>
- Iman Surya, Imam Surya, Sanny Nofrima, Herdin Arie Saputra, dan Niken Nurmiyati, (2021). "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglingga)". *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 6, No. 2, 2021
- Imron Muhammad, 2020, Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan, *Journal of public sector inovation*, vol. 4, no. 2
- Keraf, S. A., 2012, *Etika Lingkungan*, Pn. Buku Kompas, Jakarta
- Junaidi. 2016. Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal FISIP UMRAH*.
- Nababan, 2013, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat Adat, Tantangan dan Peluang*,

http://dte.gn.org/makalah_ttg_psdma_di_pplh_ipb.htm ber-

Nadia F. Tongkotow, Welly Waworundeng, Alfon Kimbal, (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok, JURNAL GOVERNANCE Vol.1, No. 1, 2021 ISSN: 2088-2815

Purwanti, Nurul D, 2016. Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer), Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UG

PROFIL PENULIS

Dr. Sri Umiyati, M.Si.

Lahir di Surabaya Surabaya, 16 September 1963 sekarang bertempat tinggal di Jl. KRI Nanggala Blok D-7, Medoan Semampir. Penulis adalah Kepala Laboratorium Kebijakan dan Manajemen Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya. Lulus S1 di Program Studi Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya tahun 1986 melanjutkan S2 di Program Studi Pengembangan SDM – Pemerintahan di Universitas Airlangga lulus pada tahun 2004 dan telah meraih Gelar Doktor dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2019 dengan judul disertasi Kualitas Pelayanan Publik (Study tentang Kepuasan Pasien BPJS Kesehatan Mandiri di Bagian rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya). Mata kuliah yang diampu diantaranya adalah Management Talenta, Azas-Azas Management, Birokrasi & Governance, Manajemen Pelayanan Publik, Manajemen Strategi Sektor Publik, Manajemen SDM. Selain mengajar, penulis juga aktif dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah diantaranya adalah; Quality of Services for Making Taxpayer Indication Number Through E-Registration System at Pratama Tax Service Office Surabaya Wonocolo (2023,), Policy Implementation of Social Security Providering Agency in Serving Outpatient Patients in Oncology Poly Rspal Dr. Ramelan Surabaya (2022),

Catchment Area in Health Services: Studies in Kasembon and Pujon Subdistricts, Malang Regency (2022) Koordinasi Antar Instansi Dalam Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya (2023) Penulis juga pernah menjadi pemakalah di beberapa seminar baik nasional maupun internasional. Hingga kini penulis aktif sebagai asesor Kompetensi yang diperoleh dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada bidang SDM.

Dr. Sri Wahyuni, M.Si.

Lahir di Madiun 8 Mei 1963, sebagai dosen pada S1, S2, dan S3 Universitas Hang Tuah Surabaya. Menyelesaikan Pendidikan S1 di FISIP UNAIR pada tahun 1986. Menyelesaikan S2 di Program Pascasarjana Ilmu Sosial UNAIR pada tahun 1996. S3 di Program Doktor Administrasi Publik UNIBRAW pada tahun 2019. Sesuai dengan konsentrasi pada kajian dan kebijakan dan pelayanan public, maka penelitian dan buku-buku yang telah dibuat terkait dengan kajian tersebut.

